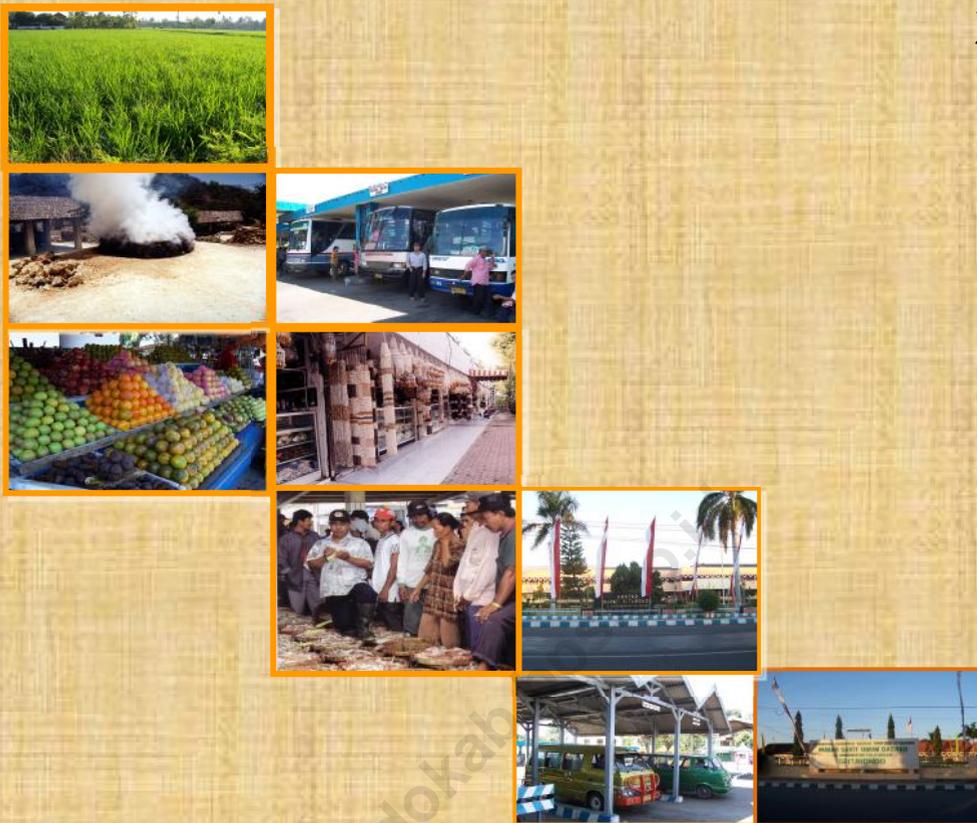


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SITUBONDO

2010-2013



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SITUBONDO

Katalog BPS : 9302008.3512

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO KABUPATEN SITUBONDO**

TAHUN 2013

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SITUBONDO

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013

ISSN :
No. Publikasi : 35120.1404
Katalog : 9302008.3512
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : $x + 167$ halaman
Cover :

Editor :

Harsono, SE

Naskah:

Riyanto Tri Susanto, S.ST, M.Si

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah selama setahun, dapat diukur dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto atau yang biasa disebut PDRB. Dalam PDRB mencerminkan nilai produksi yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit produksi dari seluruh sektor yang ada, dalam hal ini dikelompokkan menjadi Sembilan sektor.

Angka PDRB disajikan menurut dua perhitungan, yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Untuk melengkapi analisa, disusun pula tabel-tabel yang berisi persentase maupun indeks-indeks tertentu yang lazim dipergunakan. Uraian sekilas perkembangan ekonomi Kabupaten Situbondo dan konsep/ definisi yang digunakan, dicantumkan pula agar para pemakai data dapat memahami pengertian dan perhitungan dalam penyusunan PDRB.

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga tersusunnya publikasi ini, disampaikan terima kasih. Namun, disadari bahwa publikasi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik membangun selalu kami harapkan guna perbaikan publikasi mendatang.

Semoga publikasi PDRB ini bermanfaat dan membantu bagi para pengguna data utamanya dalam menentukan berbagai perencanaan dan kebijaksanaan baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.

Situbondo, Agustus 2014

KEPALA BPS SITUBONDO,



H. A. R. S. O. N. O. SE NIP.
196104281980011001

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 PDRB dan PDRB perkapita, 2010-2013	37
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo menurut Sektor, Tahun 2013	40
Tabel 4.3 Tingkat Inflasi Sektoral Kabupaten Situbondo Tahun 2013 (Persen)	41
Tabel 4.4 Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo menurut Sektor Tahun 2012 dan 2013 (persen)	43
Tabel 5.1 Peranan Sektor Pertanian terhadap PDRB Empat Tahun Terakhir (Persen)	44
Tabel 6.1 PDRB adhb per Kabupaten menurut Besarnya Peran dan Peranan Sektor Terbesar, Tahun 2013	56

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1	Pertumbuhan ekonomi 2013 menurut sector, Tahun 2013 39
Gambar 5.1	Peranan Sub sektor pada sektor Pertanian tahun 2013(persen) 45
Gambar 5.2	Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Tahun 2010- 2013 (Persen) 47
Gambar 5.3	Peranan Sub Sektor Dalam Sektor Industri , Tahun 2013 48
Gambar 5.4	Peranan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Terhadap PDRB, Tahun 2010-2013 ... 50
Gambar 5.5	Peranan Sektor Konstruksi tahun 2010 – 2013 51
Gambar 5.6	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Tahun 2013 52
Gambar 5.7	Kontribusi Sektor Pengangkutan, dan Komunikasi, 2013 53
Gambar 5.8	Peranan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB tahun 2010 – 2013 (Persen) 54

DAFTAR ISI

KATALOG	ii
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Penggantian Tahun Dasar (Rebasing).....	3
1.4 Alasan Pemilihan tahun Dasar 2000 sebagai Tahun dasar.....	4
II. KONSEP,DEFINISI DAN METODOLOGI.....	5
2.1 Pengertian dan Definisi Pendapatan Regional.....	5
2.2 Cara Penyajian	7
2.3 Konsep dan Definisi.....	10
2.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Pasar	10
2.3.2 Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar	10
2.3.3 Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor	11
2.3.4 Pendapatan Regional	11
2.3.5 Pendapatan Perorangan (Personal Income) dan Pendapatan yang Siap Dibelanjakan (Disposable Income)	12
2.3.6 Produk Domestik dan Produk Regional	14
2.3.7 Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan	15
2.4 Metode Penghitungan Pendapatan Regional.....	15
2.4.1 Metode Langsung.....	16
2.4.1.1 Pendekatan Produksi	16
2.4.1.2 Pendekatan Pendapatan.....	17
2.4.1.3 Pendekatan Pengeluaran	17
2.4.2 Metode Tidak Langsung.....	18

2.4.3 Cara Penyajian Angka Indeks	18
2.5 Penghitungan Seri Pendapatan Nasional/ Regional atas Dasar Harga Konstan.....	19
2.5.1 Revaluasi	20
2.5.2. Ekstrapolasi.....	20
2.5.3 D e f l a s i	20
2.5.4 Deflasi Berganda	19
III. URAIAN SEKTORAL	22
3.1 Sektor Pertanian	22
3.1.1 Tanaman Bahan Makanan	22
3.1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat	23
3.1.3 Tanaman Perkebunan Besar.	23
3.1.4 Peternakan dan Hasil-hasilnya.	23
3.1.5 P e r i k a n a n.....	24
3.1.6 K e h u t a n a n.....	24
3.2 Sektor Penggalian	25
3.3 Sektor Industri Pengolahan	25
3.3.1 Industri Besar dan Sedang.....	25
3.3.2 Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga.....	26
3.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.....	26
3.4.1 Listrik	26
3.4.2 Air Bersih	26
3.5 Sektor Bangunan.....	26
3.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	27
3.6.1 Perdagangan Besar dan Eceran	27
3.6.2 H o t e l.....	28
3.6.3 Restoran.....	28
3.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	28
3.7.1 Angkutan Kereta Api	28
3.7.2 Angkutan Jalan Raya.....	29
3.7.3 Angkutan Laut.....	29
3.7.4 Jasa Penunjang Angkutan.....	29
3.7.4.1 Terminal dan Perparkiran.....	30
3.7.4.2 Bongkar/ Muat	30
3.7.4.3 Keagenan.....	30

3.7.5 Komunikasi	30
3.7.5.1 Pos dan Giro.....	31
3.7.5.2 Telekomunikasi.....	31
3.7.5.3 Jasa Penunjang Komunikasi.....	31
3.8 Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	31
3.8.1 B a n k	31
3.8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	32
3.8.3 Sewa Bangunan	32
3.8.4 Jasa Perusahaan	33
3.9 Sektor Jasa-jasa.....	33
3.9.1 Jasa Pemerintahan Umum	33
3.9.2 Jasa Sosial Kemasyarakatan.....	33
3.9.2.1 Jasa Pendidikan.....	33
3.9.2.2 Jasa Kesehatan	34
3.9.2.3 Jasa Sosial Kemasyarakatan Lainnya	34
3.9.3 Jasa Hiburan dan Kebudayaan	35
3.9.4 Jasa Perorangan dan Rumahtangga	35
IV. URAIAN SINGKAT ANGKA PDRB	37
4.1 PDRB dan PDRB per Kapita tahun 2013	37
4.2 Laju Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi)	39
4.3 Tingkat Inflasi Tahun 2013.....	40
4.4 Struktur Ekonomi Tahun 2013.....	42
V. PERANAN SEKTORAL.....	44
5.1 Sektor Pertanian	44
5.2 Sektor Penggalian	46
5.3 Sektor Industri Pengolahan.....	48
5.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.....	50
5.5 Sektor Bangunan.....	50
5.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	51
5.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	53
5.8 Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	54

5.9 Sektor Jasa-jasa.....	55
VI. TINJAUAN EKONOMI KEWILAYAHAN.....	56
6.1 Tinjauan Ekonomi Wilayah disekitar Kabupaten Situbondo	56
VII. TABEL POKOK PDRB	58-66

<https://situbondokab.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja perekonomian Kabupaten Situbondo yang direfleksikan dengan angka PDRB(Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 2013 cukup menggembirakan, yaitu tumbuh sebesar 6,87 persen. Dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 (6,54 persen), maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 lebih tinggi 0,33 persen poin. Selain itu, perkembangan sektoral juga cukup menjanjikan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan motor penggerak perekonomian di Kabupaten Situbondo menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu 8,77 persen. Kedua sektor tersebut cukup banyak menyerap tenaga kerja. Karena itu kondisi demikian sangat mendukung visi kabupaten situbondo yang salah satunya adalah masyarakat yang sejahtera.

Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah memerlukan beberapa parameter untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Visi Pembangunan Situbondo seperti yang tersebut dalam dokumen perencanaan strategis (renstra) adalah **TERWUJUDNYA MASYARAKAT SITUBONDO YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN**. Sedangkan, Misi pembangunan Situbondo adalah:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari hari serta memberi perhatian pada lembaga untuk kelancaran peran dan tanggung jawab

2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
3. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat
4. Meningkatkan kualitas dan mentalitas pengabdian pengelola pemerintahan demi terwujudnya profesionalitas kinerja pelayanan
5. Meningkatkan kualitas demokrasi, supremasi hukum dan HAM melalui peningkatan Kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat.

Indikator untuk menyukseskan capaian visi dan misi tersebut salah satunya adalah dengan PDRB dan PDRB perkapita. PDRB merupakan indikator makro yang menggambarkan potensi suatu wilayah, sedangkan PDRB perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan pendapatan per kapita, perbandingan perekonomian antar wilayah dan tingkat perubahan harga yang terjadi, perlu disusun statistik pendapatan regional secara berkala, yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, dan evaluasi pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Implementasi dari pembangunan ekonomi suatu daerah, umumnya dihadapkan pada dua permasalahan pokok, yaitu :

1. bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata;
2. bagaimana mengusahakan agar pendapatan tersebut dapat dinikmati atau diterima oleh masyarakat seadil-adilnya.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sangatlah diperlukan perhitungan produk domestik regional bruto dari tahun ke tahun, untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu.

I.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyediaan data PDRB antara lain untuk :

1. Mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, baik sektoral maupun secara keseluruhan;
2. Mengetahui struktur ekonomi (kontribusi sektoral) atau peranan sektor yang sangat dominan terhadap ekonomi secara keseluruhan;
3. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah diukur dari PDRB per kapita;
4. Dasar penyusunan dan bahan Penghitungan DAU;
5. Mengetahui tingkat inflasi dan deflasi yang dapat menunjukkan kenaikan atau penurunan daya beli masyarakat;
6. Membandingkan keadaan perekonomian antar kecamatan.
7. Membandingkan keadaan perekonomian antar daerah.

I.3 Penggantian Tahun Dasar (*Rebasing*)

Rebasing adalah suatu proses penetapan kembali tahun dasar baru yang dipakai dalam penghitungan PDB/ PDRB. Penggantian tahun dasar ini (*base year*) dalam penghitungan PDB/ PDRB harus selalu diperbaharui untuk mengakomodir perkembangan ekonomi yang terjadi. Tahun dasar merupakan suatu tahun yang ditetapkan sebagai dasar waktu rujukan bagi penghitungan PDB/ PDRB.

Syarat-syarat tahun dasar

- a. Kondisi ekonomi relatif stabil;

- b. Awal dari suatu peristiwa besar, dimana semua hasil pembangunan ekonomi akan dibandingkan dengan saat itu;
- c. Kelengkapan data dasar yang digunakan sebagai input dalam penyusunan PDB/ PDRB;
(Implikasi Rebasing)

Perbedaan hasil pengukuran PDB/ PDRB tahun dasar lama dan baru antara lain adalah :

1. Nilai Nominal (ADHB);
2. Nilai Riil (ADHK);
3. Struktur Ekonomi;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Indeks Implisit

I.4 Alasan Pemilihan tahun Dasar 2000 sebagai Tahun dasar

- a. Tahun dasar lama dianggap sudah tidak relevan lagi dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang terjadi;
- b. Merupakan kesepakatan bersama yang dideklarasikan oleh negara-negara Asia Pasifik (UN-ESCAP);
- c. Tahun 2000 merupakan awal berlangsungnya proses pemulihan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis ekonomi;
- d. Kondisi Ekonomi Indonesia pada tahun 2000 mulai stabil;
- e. Adanya pembaharuan konsep-konsep yang berbasis pada SNA (2000), meski belum seluruh konsep dapat diaplikasikan.

II. KONSEP, DEFINISI DAN METODOLOGI

2.1 Pengertian dan Definisi Pendapatan Regional

Secara garis besar kegiatan ekonomi mencakup kegiatan **memproduksi** dan mengkonsumsi barang dan jasa. Dari memproduksi barang dan jasa timbul **pendapatan** yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang telah dimiliki oleh berbagai golongan dalam masyarakat, sehingga dari pendapatan masyarakat tersebut akan dipergunakan kembali untuk **mengkonsumsi** barang-barang yang menjadi kebutuhannya.

Kegiatan yang terus berhubungan tersebut mempunyai pengertian bahwa nilai barang yang dihasilkan/ diproduksi (*product*) akan sama dengan pendapatan yang diterima oleh golongan-golongan dalam masyarakat (*income*), dan akan sama pula dengan jumlah pengeluaran oleh berbagai golongan dalam masyarakat (*expenditure*). Oleh karena itu, pada dasarnya produk regional (*Regional Product*), pendapatan regional (*regional income*) dan pengeluaran regional (*regional expenditure*) adalah sama. Hanya saja, dari segi mana melihatnya, produksi, pendapatan atau pengeluaran.

Dari segi produksi, produk regional merupakan jumlah nilai produk akhir atau nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki oleh penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dari segi pendapatan, pendapatan regional merupakan jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Dari segi pengeluaran, pengeluaran regional merupakan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor netto.

Beberapa istilah yang berhubungan penghitungan PDRB, yaitu output, biaya antara (*intermediate cost*) dan nilai tambah bruto/ NTB (*gross value added*).

Output

Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya diperoleh dari dari perkalian **kuantum produksi** (**Q**) dan **harga** (**P**). Dengan demikian besaran output diperoleh dengan rumus,

$$Output = Q \times P$$

Biaya Antara

Biaya antara merupakan nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai bahan untuk memproduksi *output* dan terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan di dalam proses oleh unit-unit produksi dalam domestik tertentu pada waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Nilai Tambah Bruto

Nilai Tambah Bruto (NTB) merupakan hasil pengurangan dari nilai output dengan biaya antaranya, atau apabila dirumuskan menjadi :

$$NTB = Output - Biaya Antara$$

NTB atau nilai tambah bruto tidak lain merupakan penjumlahan dari seluruh besaran nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi yang berada pada region tertentu dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Dengan demikian pengertian total output dalam suatu wilayah merupakan penjumlahan dari seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) dari seluruh proses produksi, bukan penjumlahan dari

seluruh outputnya sebab terdapat inter-relasi antara satu proses produksi yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, produksi pisang akan menjadi input antara bagi industri pisang goreng, industri kripik dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila dijumlahkan seluruh output dari semua proses produksi, akan terjadi penghitungan ganda/ duplikasi. Jelaslah, bahwa yang dihitung bukanlah outputnya tetapi nilai tambah (NTB).

2.2 Cara Penyajian

PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada penyajian atas dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara, maupun pada penilaian komponen pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto;
- b. Pada penyajian atas dasar Harga Konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar (dalam publikasi ini harga konstan didasarkan pada harga tahun 2000). Harga yang digunakan adalah harga tetap, maka perkembangan *agregat* dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

Perubahan tahun dasar diatas dilakukan, karena perekonomian tahun 2000 sebagai tahun dasar sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian pada saat sekarang, baik yang menyangkut perkembangan harga, pola produksi dan konsumsi, maupun jenis dan kualitas barang/ jasa yang dihasilkan.

Angka PDRB juga disajikan dalam bentuk peranan sektoral dan angka-angka indeks, yaitu indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks harga implisit yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Peranan sektoral**, yaitu diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB masing-masing sektor dengan nilai total seluruh sektor ekonomi secara keseluruhan dikalikan 100 pada tahun yang bersangkutan, baik yang dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Untuk mengetahui besarnya peranan sektoral dari masing-masing sektor ekonomi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$P_i = \frac{PDRB_i}{\sum PDRB_i} \times 100$$

P = peranan sektoral

i = sektor 1, 2, 3, sektor 9

dalam penyajiannya, peranan sektoral biasanya ditulis : **Distribusi Persentase PDRB**

- b. **Indeks Perkembangan**, yaitu diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat dari tahun ke tahun terhadap tahun dasarnya (2000 = 100). Indeks Perkembangan dapat dirumuskan dalam formula sebagai berikut :

$$IP = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i0}} \times 100$$

IP = Indeks Perkembangan

I = sektor 1, 2, 3, 9;

t = tahun *t* 0 = tahun dasar

c. **Indeks Berantai**, diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya. Apabila angka ini dikalikan dengan 100, kemudian hasilnya dikurangi 100, maka angka ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat produksi untuk masing-masing tahun. Angka ini lebih dikenal dengan sebutan **pertumbuhan ekonomi** yang dihitung atas dasar harga konstan. Metode penghitungan ini dapat pula digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan sektoral. Apabila dirumuskan dalam formula, yaitu sebagai berikut :

$$IB = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i,t-1}} \times 100$$

IB = Indeks Berantai
i = sektor 1, 2, 39;
t = tahun *t*
t - 1 = tahun sebelumnya

d. **Indeks Harga Implisit**, diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahun dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya dari indeks harga implisit dihitung indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun sebelumnya. Indeks ini secara berkala dapat menunjukkan besaran inflasi yang mencakup seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah. Bila diumuskan dalam suatu formula sebagai berikut :

$$IHI = \frac{PDRB_{ithb}}{PDRBi_{ithk}} \times 100$$

IHI = indeks Harga Implisit

hb = harga berlaku

hk = harga konstan

2.3 Konsep dan Definisi

2.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Pasar

Angka Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tersebut akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

2.3.2 Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep bruto dan konsep netto, yaitu pada konsep bruto faktor penyusutan masih termasuk didalamnya, sedangkan pada konsep netto, faktor penyusutan sudah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh produk domestik regional netto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai susut (aus) barang-barang modal atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan sebagainya) yang terjadi selama barang

modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan “penyusutan”.

2.3.3 Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor dan konsep harga pasar adalah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan.

Pajak tak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli sehingga langsung berakibat menaikkan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang berakibat menaikkan harga barang jadi (output), subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi terutama unit-unit produksi yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dengan tujuan untuk menekan atau menurunkan harga sehingga bisa dijangkau atau dibeli masyarakat luas. Dengan demikian pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh yang berlawanan terhadap harga barang dan jasa (output produksi).

Selisih antara pajak tidak langsung dan subsidi dalam penghitungan pendapatan regional disebut pajak tidak langsung netto. Bila produk domestik regional netto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung netto, maka hasilnya adalah produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor.

2.3.4 Pendapatan Regional

Dari konsep-konsep yang diterangkan diatas dapat diketahui bahwa produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah tersebut. Produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji,

bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul, atau merupakan pendapatan yang berasal dari wilayah tersebut, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah tersebut, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar, yaitu milik orang yang mempunyai modal tadi. Sebaliknya, kalau ada penduduk daerah ini menanamkan modal di luar daerah, maka sebagian keuntungan perusahaan tadi akan mengalir ke dalam daerah tersebut dan menjadi pendapatan daerah pemilik modal tadi. Apabila produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar dan ditambah pendapatan yang masuk dari daerah lain, maka hasilnya akan merupakan jumlah produk domestik regional netto yaitu merupakan pendapatan yang benar-benar diterima (*income receipt*) oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

Produk regional netto adalah yang sebenarnya merupakan pendapatan regional, akan tetapi untuk mendapatkan angka-angka tentang pendapatan yang mengalir keluar atau masuk ini (yang secara nasional dapat diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri) masih sangat sukar diperoleh pada saat ini, hingga produk regional itu terpaksa belum dapat dihitung dan untuk sementara dalam penghitungan ini produk domestik regional netto dianggap sebagai pendapatan regional. Bila pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan per kapita.

2.3.5 Pendapatan Perorangan (Personal Income) dan Pendapatan yang Siap Dibelanjakan (Disposable Income)

Dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas, maka konsep-konsep yang dipakai dalam pendapatan regional dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar (*GRDP at market price*) dikurangi penyusutan akan sama dengan;
2. Produk domestik regional netto atas dasar harga pasar (*NRDP at market price*), dikurangi pajak tidak langsung netto akan sama dengan;
3. Produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor (*NRDP at factor cost*), ditambah pendapatan netto yang mengalir dari/ ke daerah lain akan sama dengan;
4. Pendapatan regional (*regional income*), bila dikurangi pajak pendapatan perusahaan (*corporate income taxes*) keuntungan yang tidak dibagikan (*undistributed profit*), iuran kesejahteraan sosial (*social security contribution*), ditambah transfer yang diterima oleh rumah tangga, bunga netto atas hutang pemerintah akan sama dengan;
5. Pendapatan perorangan (*personal income*), bila dikurangi pajak rumah tangga, transfer yang dibayarkan oleh rumah tangga akan sama dengan;
6. Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*).

Dengan susunan ini terlihat bahwa pendapatan perorangan merupakan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, ternyata tidak seluruh pendapatan regional diterima rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian tidak dibayar kepada rumah tangga, akan tetapi pajak pendapatan perusahaan diterima oleh pemerintah, keuntungan yang tidak dibagikan ditahan di perusahaan-perusahaan dan dana jaminan sosial dibayar kepada instansi-instansi yang berwenang. Sebaliknya, rumah tangga masih menerima tambahan yang merupakan transfer payments baik dari pemerintah maupun perusahaan dan bunga netto atas hutang pemerintah. Bila pendapatan perorangan ini dikurangi dengan pajak yang langsung

dibebankan kepada rumah tangga dan hibah yang diberikan oleh rumah tangga, maka hasilnya merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*).

2.3.6 Produk Domestik dan Produk Regional

Seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari/ atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik *region* yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Wilayah domestik atau *region* yang dimaksud adalah yang betul-betul berada di dalam batas geografis daerah tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa ada sebagian dari kegiatan produksi yang dilakukan di suatu daerah, namun beberapa faktor produksinya berasal/ masuk dari daerah lain dan sebaliknya. Hal ini menyebabkan nilai produksi domestik yang timbul di suatu daerah bisa tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut.

Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antara daerah ini termasuk juga dari/ keluar negeri yang pada umumnya berupa upah upah gaji, deviden dan keuntungan, maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Produk regional yang dimaksud adalah produk domestik ditambah pendapatan dari luar daerah dikurangi dengan pendapatan yang dibayar keluar daerah tersebut. Jadi produk regional merupakan produk yang betul-betul ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki penduduk daerah tersebut.

2.3.7 Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan

Seperti telah diuraikan diatas, angka-angka pendapatan regional menggambarkan adanya kenaikan ataupun penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan atau penurunan tersebut dapat dibedakan oleh dua faktor :

1. Kenaikan/penurunan riil yaitu kenaikan/penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Bila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat,
2. Kenaikan/penurunan pendapatan yang disebabkan karena adanya faktor perubahan harga. Bila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan karena adanya inflasi (menurunnya nilai uang) akan melemahkan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu untuk mengetahui pendapatan yang sebenarnya (riil), faktor inflasi ini terlebih dahulu harus dikeluarkan. Pendapatan regional dengan faktor inflasi yang masih ada didalamnya merupakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan.

Dengan alasan inilah, maka pendapatan regional perlu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar yang **berlaku** dan atas dasar harga **konstan**.

2.4 Metode Penghitungan Pendapatan Regional

Pendapatan regional dapat dihitung melalui dua metode, yaitu :

1. Metode langsung,
2. Metode tidak langsung.

Metode langsung adalah penghitungan dengan mempergunakan data daerah secara terpisah sama sekali dengan data nasional sehingga hasil perhitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut.

Metode langsung dapat dilakukan dengan mempergunakan 3 macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan produksi,
2. Pendekatan pendapatan,
3. Pendekatan pengeluaran.

Metode tidak langsung dengan cara alokasi yaitu mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional dengan memakai berbagai macam indikator produksi sebagai alokatornya.

2.4.1 Metode Langsung

2.4.1.1 Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi adalah dengan menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan produksi yang berbentuk barang, seperti pertanian, pertambangan, industri dan sebagainya.

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (*output*) dan nilai-nilai biaya antara (*intermediate cost*) yang dipakai dalam proses produksi. Nilai ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

2.4.1.2 Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Pada sektor pemerintahan dan untuk usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Pengertian surplus usaha disini adalah bunga *netto*, sewa tanah dan keuntungan.

Metode pendekatan pendapatan ini banyak dipakai pada sektor yang produksinya berupa jasa seperti sektor pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan tidak tersedianya atau kurang lengkapnya data mengenai nilai produksi dan biaya antara (*intermediate cost*).

2.4.1.3 Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jadi bila dilihat dari segi penggunaan, maka total *supply* dari barang dan jasa itu digunakan untuk,

- a. Konsumsi rumah tangga,
- b. Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung,
- c. Konsumsi pemerintah,
- d. Pembentukan modal tetap bruto,
- e. Perubahan stock,
- f. Ekspor netto.

Dipakainya istilah ekspor netto disini, karena yang akan dihitung hanya nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi dalam negeri saja, maka dari jumlah penyediaan diatas nilai impor perlu dikeluarkan kembali.

2.4.2 Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik regional bruto (PDRB) Propinsi ke setiap Kabupaten dengan menggunakan alokator tertentu yang didasarkan atas,

- a. Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/ sub sektor,
- b. Jumlah produksi fisik,
- c. Tenaga kerja,
- d. Penduduk, dan
- e. Alokator tidak langsung.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing kabupaten terhadap nilai tambah setiap sektor dan sub sektor.

2.4.3 Cara Penyajian Angka Indeks

Agregat-agregat pendapatan seperti yang telah diuraikan diatas, secara seri selalu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan, masing-masing dibedakan atas sebagai berikut :

- a. Pada penyajian atas dasar harga berlaku , semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran produk domestik regional bruto,
- b. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar. Dengan menggunakan harga tetap, maka

perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan riil dan bukan karena kenaikan harga. Agregat-agregat pendapatan juga disajikan dalam bentuk angka indeks perkembangan, indeks berantai dan indeks implisit, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks perkembangan , diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun terhadap tahun dasar,
2. Indeks berantai , diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya, dikalikan 100. Jadi, tahun sebelumnya selalu dianggap 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan untuk masing masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
3. Indeks harga implisit, diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahun dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar.

2.5 Penghitungan Seri Pendapatan Regional atas Dasar Harga Konstan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, penghitungan seri pendapatan nasional/ regional atas dasar harga konstan tahun dasar 2000, sangat penting untuk melihat perkembangan riil dari tahun ke tahun setiap agregat ekonomi yang diamati. Agregat yang dimaksud tersebut dapat merupakan produk domestik bruto secara keseluruhan. Nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

2.5.1 Revaluasi

Revaluasi adalah penilaian kembali cara penilaian produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan tahun dasar 2000, hasilnya merupakan output dan biaya antara hasil perhitungan tersebut. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang terlalu banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

2.5.2. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dikalikan dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output, akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

2.5.3 Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga perdagangan besar dan sebagainya.

Indeks harga diatas dapat pula dipakai sebagai inflator, dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

2.5.4 Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antara, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara yang telah dideflasi tersebut.

Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya. Sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks dari komponen input terbesar.

Kenyataan sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam perhitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak digunakan.

Penghitungan komponen penggunaan produk domestik bruto atas dasar harga konstan juga dilakukan dengan menggunakan cara-cara diatas, tetapi mengingat data yang tersedia maka cara deflasi dan ekstrapolasi lebih banyak dipakai

BAB III URAIAN SEKTORAL

Uraian sektoral yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan sub sektor serta cara penghitungan nilai tambah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

3.1 Sektor Pertanian

3.1.1 Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan, yaitu padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedele, sayur-sayuran, buah-buahan, kentang, kacang hijau, biji-bijian lainnya dan hasil- hasil produksi ikutannya. Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian melalui pengumpulan data tanaman Bahan makanan dan ubinan yang dilakukan bersama antara Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten Situbondo, sedangkan data harga diperoleh dari survei harga yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Situbondo.

Nilai tambah bruto atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu dengan mengalikan masing-masing jenis kuantum produksi dengan masing-masing harganya, kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya antara pada setiap tahun. Biaya antara tersebut diperoleh dengan menggunakan ratio biaya antara terhadap output hasil Survei Khusus Pendukung Produk Domestik Regional Bruto (SK-PDRB) yang dilakukan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo.

Nilai tambah atas dasar harga konstan dihitung dengan cara revaluasi yaitu dengan mengalikan produksi masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar, kemudian dikurangi dengan biaya antara atas dasar harga konstan.

3.1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat.

Cakupan pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat disini adalah komoditi tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat, seperti kelapa, kopi, kapuk, tebu, tembakau, cengkeh, lada, jarak, kapas dan sebagainya, termasuk produk ikutannya.

Data produksi dan harga diperoleh dari Dinas Pertanian sub Bidang Perkebunan. Nilai tambah atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi, sedangkan rasio biaya antara diperoleh dari Survei Khusus Pendukung Produk Domestik Regional Bruto (SK-PDRB) yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Situbondo. Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum produksi dengan harga pada tahun dasar.

3.1.3 Tanaman Perkebunan Besar.

Sub sektor ini mencakup komoditi perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar, seperti kopi, coklat, kelapa/kopra, tebu, tembakau, kapas dan kapuk randu. Baik data produksi maupun harga diperoleh dari Sub Dinas Perkebunan dan hasil survei khusus perkebunan yang dilakukan BPS Situbondo baik terhadap perusahaan yang dikelola oleh P.T.P. Nusantara XI (PT. Persero) dan Perusda banongan maupun perkebunan swasta. Cara penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan sama seperti yang dilakukan pada tanaman perkebunan rakyat.

3.1.4 Peternakan dan Hasil-hasilnya.

Sub sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak, seperti susu segar, telur serta hasil pematangan ternak. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong ditambah perubahan stock populasi ternak dan ternak keluar netto. Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, populasi ternak, produksi susu dan

telur, ternak keluar masuk wilayah, serta harga, selain diperoleh dari Dinas Peternakan juga berasal dari survei khusus pada Rumah Potong Hewan (RPH) dan keurmaster yang dilakukan BPS Kabupaten Situbondo.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi, sedangkan ratio biaya antara diperoleh dari Survei Khusus Pendapatan Regional dari hasil survei BPS. Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara revaluasi.

3.1.5 Perikanan.

Komoditi yang dicakup adalah produksi yang dihasilkan dari kegiatan perikanan laut, perikanan darat serta pengolahan sederhana (pengeringan dan penggaraman ikan), budi daya tambak/ hatchery disepanjang pantai dari Kecamatan Banyuglugur sampai Banyuputih. Data mengenai produksi dan nilai output diperoleh dari laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan dan hasil survei BPS.

Penghitungan nilai tambah bruto Sub Sektor Perikanan dilakukan dengan menggunakan pendekatan produksi, sama seperti yang dilakukan pada sub sektor sebelumnya. Nilai tambah atas dasar harga konstan, diperoleh dengan cara revaluasi.

3.1.6 Kehutanan

Sub sektor kehutanan yang dicakup adalah berbagai komoditi kayu, seperti kayu jati, pinus, bambu dan hasil hutan lainnya. Data produksi dan harga diperoleh dari PT. Persero Perhutani yang sebagian datanya berada di wilayah Banyuwangi Utara, Bondowoso dan Probolinggo, karena berbatasan dengan tiga Kabupaten tersebut. Selain itu data pendukung berasal dari Dinas Pertanian Sub bidang Kehutanan dari survei khusus yang dilakukan oleh BPS Situbondo

Penghitungan nilai tambah bruto sub sektor kehutanan atas dasar harga yang berlaku dilakukan dengan cara pendekatan produksi, sama seperti yang dilakukan pada sub sektor sebelumnya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara revaluasi.

3.2 Sektor Penggalian

Cakupan sektor penggalian yang ada di Kabupaten Situbondo adalah komoditi tambang galian golongan C, diantaranya komoditi pasir, tanah liat, batu, batu kapur dan trass. Data produksi diperoleh dari berbagai survei penggalian dan Bagian Ekonomi dan Sosial, sedangkan data harga diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik. Penghitungan nilai tambah dilakukan dengan cara pendekatan produksi.

Rasio biaya antara hasil penggalian mineral golongan C pada umumnya diperoleh dari Survei Khusus Pendukung Produk Domestik Regional Bruto (SK-PDRB) disamping dari hasil survei sektor penggalian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan untuk penggalian dihitung dengan cara revaluasi.

3.3 Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini mencakup sub sektor industri besar dan sedang, industri kecil dan kerajinan rumah tangga (IKKR)

3.3.1 Industri Besar dan Sedang

Baik output maupun nilai tambah bruto atas dasar harga yang berlaku diperoleh dari survei industri tahunan yang meliputi seluruh industri besar dan sedang yang terdaftar dalam direktori pemerintah oleh BPS Kabupaten Situbondo. Output atas dasar harga konstan dihitung dengan cara ekstrapolasi. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan rasio nilai tambah terhadap output tahun dasar.

3.3.2 Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

Output dan nilai tambah bruto industri kecil dan kerajinan rumah tangga diperoleh dengan pendekatan produksi yaitu dengan mengalikan rata-rata output per tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sub sektor industri kecil dan rumah tangga. Nilai tambah bruto diperoleh dengan cara mengalikan persentase nilai tambah berdasarkan hasil survei khusus terhadap output, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara revaluasi.

3.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

3.4.1 Listrik

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan kelistrikan, baik yang diusahakan oleh PLN maupun non PLN. Data produksi, harga dan biaya antara sub sektor ini diperoleh dari PLN distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian produksi dengan harga yang berlaku pada masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan, diperoleh dengan cara revaluasi.

3.4.2 Air Bersih

Sub sektor ini mencakup air minum yang diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Data produksi, harga, dan biaya-biaya yang dikeluarkan diperoleh dari hasil survei BUMD yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan cara revaluasi.

3.5 Sektor Konstruksi

Sektor Konstruksi mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, irigasi, jaringan listrik dan konstruksi lainnya. Nilai tambah

bruto dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi. Output diperoleh dari penjumlahan nilai pembangunan prasarana fisik yang dibangun oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dari dana APBN, APBD, developer, KPR-BTN dan pembangunan oleh swadaya murni dari masyarakat. Persentase nilai tambah bruto diperoleh dari survei khusus. Output atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara deflasi, deflatornya adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan dan konstruksi.

3.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

3.6.1 Perdagangan Besar dan Eceran

Penghitungan nilai tambah sub sektor perdagangan dilakukan dengan pendekatan arus barang (*commodity flow*), yaitu dengan menghitung besarnya nilai komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, serta komoditi impor yang digunakan. Dari nilai komoditi yang diperdagangkan, diturunkan nilai margin perdagangan yang merupakan output perdagangan yang selanjutnya dipakai untuk menghitung nilai tambahnya. Rasio besarnya barang-barang yang diperdagangkan, margin perdagangan dan persentase nilai tambah diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendukung Produk Domestik Regional Bruto (SK-PDRB) dan survei khusus lainnya

Nilai produksi bruto atas dasar harga konstan, dihitung dengan mengalikan rasio dengan output atas dasar harga konstan 2000 dari masing-masing sektor pertanian, pertambangan, penggalian, industri serta impor. Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian antara rasio nilai tambah dengan outputnya.

3.6.2 Hotel

Kegiatan sub sektor ini mencakup semua hotel jenis Melati dan berbagai jenis penginapan lainnya. Output dihitung dengan cara mengalikan jumlah tamu dan tarifnya. Dalam hal ini malam tamu dianggap sebagai kuantum dari output. Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan perkalian antara persentase nilai tambah dengan outputnya. Data didapat survei bulanan Hotel yang dilakukan BPS Situbondo.

3.6.3 Restoran

Data dasar Restoran dan rumah makan didapat dari beberapa sensus seperti sensus ekonomi dan data Potensi Desa untuk menutupi minimnya data restoran, baik restoran besar, sedang dan kecil yang ada di Kabupaten. Output diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja yang bekerja di sub sektor restoran dari hasil Sensus beserta pertumbuhannya dengan output tenaga kerja dari hasil Survei Khusus Pendukung Produk Domestik Regional Bruto (SK-PDRB). Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan cara deflasi, menggunakan indeks harga konsumen makanan jadi dan minuman dari survei yang dilakukan BPS terhadap harga-harga sebagai deflator.

3.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang dan penumpang, baik melalui darat, dan laut. Sektor ini mencakup pula jasa penunjang angkutan dan komunikasi.

3.7.1 Angkutan Kereta Api

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan Perum Kereta Api. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang

penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Data diperoleh dari Perum Kereta Api Stasiun Situbondo dan Panarukan, akan tetapi sudah tidak beroperasi mulai Tahun 2005.

3.7.2 Angkutan Jalan Raya

Sub sektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor maupun tidak bermotor, seperti bis, truk, colt, taksi, becak, dokar dan sebagainya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dengan menggunakan pendekatan produksi yang didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang wajib uji yang diperoleh dari laporan Dinas Perhubungan, dan hasil Survei Khusus Pendukung Produk Domestik Regional Bruto (SK-PDRB) Untuk data kendaraan tidak bermotor diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan berbagai survei. Nilai tambah atas dasar harga konstan dihitung dengan cara revaluasi.

3.7.3 Angkutan Laut

Sub sektor angkutan laut meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran milik nasional. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara alokasi dari sub sektor angkutan laut. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks gabungan tertimbang jumlah barang yang dikirim dan bongkar/ muat. Data angkutan laut diperoleh melalui Kanpel Kalbut dan Kanpel Panarukan dan laporan SIMOPPEL.

3.7.4 Jasa Penunjang Angkutan

Meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal dan parkir, keagenan barang dan

penumpang, ekspedisi, bongkar/ muat, penyimpanan dan pergudangan serta jasa penunjang angkutan lainnya.

3.7.4.1 Terminal dan Perparkiran

Mencakup kegiatan pemberian pelayanan dan pengaturan lalu lintas kendaraan/ armada yang membongkar atau mengisi muatan, baik barang maupun penumpang, seperti kegiatan terminal dan parkir, dan pelabuhan laut. Pelayanan yang disediakan di pelabuhan laut meliputi fasilitas berlabuh, tambat, pandu, distribusi air tawar serta kegiatan pencatatan muatan barang dan penumpang. Data output pelabuhan laut diperoleh dari Kanpel Panarukan dan kalbut. Hanya saja saat ini tidak memungkinkan untuk Kapal-kapal besar masuk ke Pelabuhan Panarukan, karena terlalu dangkal.

3.7.4.2 Bongkar/ Muat

Kegiatan bongkar/ muat mencakup pemberian pelayanan bongkar/ muat angkutan barang melalui laut dan darat. Indikator produksi untuk bongkar muat melalui laut adalah jumlah barang yang dibongkar dan dimuat. Data bongkar/ muat barang diperoleh dari laporan bulanan SIMOPPEL dari pelabuhan Kalbut dan Panarukan.

3.7.4.3 Keagenan

Kegiatan keagenan mencakup pelayanan keagenan barang dan penumpang yang diberikan kepada usaha angkutan, baik darat maupun laut. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara deflasi dengan menggunakan indeks harga konsumen biaya transpor.

3.7.5 Komunikasi

Kegiatan yang dicakup adalah jasa pos, giro dan telekomunikasi.

3.7.5.1 Pos dan Giro

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemberian jasa Pos dan Giro, seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan dan sebagainya. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan kepada data produksi dan struktur biaya yang diperoleh dari laporan keuangan PT Pos Indonesia (Persero) . Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara ekstrapolasi, menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim dan jumlah uang yang digirokan.

3.7.5.2 Telekomunikasi

Kegiatan ini mencakup pemberian jasa dalam hal pemakaian telepon, telegram dan jasa internet. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Kancatel Situbondo. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit lokal/ interlokal dan banyaknya pelanggan telepon .

3.7.5.3 Jasa Penunjang Komunikasi

Kegiatan sub sektor ini mencakup pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang kegiatan komunikasi, seperti warnet, wartel, warpostel, telepon seluler dan lain-lain.

3.8 Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor ini meliputi kegiatan perbankan, lembaga keuangan bukan bank (LKBB), jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan.

3.8.1 Bank

Nilai tambah bruto sub sektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia atau dengan cara deflasi dengan menggunakan indeks harga konsumen (umum),

sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan indeks kredit yang diberikan bank pada tiap-tiap tahun. Data diperoleh dari Bank Indonesia Cabang Jember dan diolah dari laporan BI setiap bulannya.

3.8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kegiatan lembaga keuangan bukan bank meliputi kegiatan asuransi, koperasi, yayasan dana pensiun dan pegadaian. Penghitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi. Output diperoleh dari perkalian indikator produksi dan harga, sedangkan nilai tambah bruto diperoleh dengan cara mengurangi nilai biaya antara dari nilai output. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan cara revaluasi. Data tersebut diperoleh dari Survei Khusus Pendukung Produk Domestik Regional Bruto (SK-PDRB) yang dilakukan oleh BPS.

3.8.3 Sewa Bangunan

Sektor ini mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan rumah bangunan sebagai tempat tinggal rumahtangga dan bukan sebagai tempat tinggal, tanpa memperhatikan apakah bangunan itu milik sendiri ataupun disewa. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan didasarkan atas pengeluaran konsumsi rumahtangga, khususnya pengeluaran untuk sewa rumah. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan jumlah bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal sebagai ekstrapolatornya, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara menginflasi nilai bangunan dan tempat tinggal.

3.8.4 Jasa Perusahaan

Sektor jasa perusahaan meliputi sub sektor jasa pengacara, jasa, jasa pengolahan data, jasa periklanan, Notaris dan sebagainya. Penghitungan output dan nilai tambah bruto didasarkan kepada data jumlah tenaga kerja yang bekerja di sub sektor tersebut. Rata-rata output per tenaga kerja dan persentase nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara revaluasi.

3.9 Sektor Jasa-jasa

3.9.1 Jasa Pemerintahan Umum

Nilai tambah bruto sub sektor jasa pemerintahan umum terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencakup upah dan gaji dari belanja rutin dan sebagian dari belanja pembangunan. Penyusutan diperkirakan 5 % dari total upah dan gaji yang telah dihitung. Data yang dipakai dalam perhitungan adalah realisasi dari pengeluaran pemerintah pusat dan daerah yang diperoleh dari instansi Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Bondowoso.

3.9.2 Jasa Sosial Kemasyarakatan

Sub sektor ini mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta jasa kemasyarakatan lainnya, seperti jasa pendidikan, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat dan rumah ibadah. Kegiatan-kegiatan jasa sosial dan kemasyarakatan hanya terbatas yang dikelola oleh swasta saja, sedangkan yang dikelola oleh pemerintah termasuk dalam sektor pemerintahan.

3.9.2.1 Jasa Pendidikan

Data yang digunakan dalam menghitung nilai tambah bruto sub sektor jasa pendidikan adalah jumlah murid sekolah swasta menurut jenjang pendidikan, yang diperoleh dari Kantor

Dinas Pendidikan Kabupaten. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara revaluasi.

3.9.2.2 *Jasa Kesehatan*

Kegiatan dari sub sektor jasa kesehatan adalah mencakup jasa rumah sakit, dokter praktek dan jasa kesehatan lainnya yang dikelola oleh swasta. Output diperoleh dari perkalian antara rata-rata output per indikator produksi dan kuantum produksinya, seperti rata-rata output tempat tidur rumah sakit dan jumlah tempat tidur, rata-rata output per dokter dan jumlah dokter praktek, rata-rata output bidan dan jumlah bidan praktek serta jasa kesehatan lainnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan atas persentase terhadap output. Data yang digunakan bersumber dari Dinas Kesehatan dan hasil survei khusus pendapatan regional. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan, dihitung dengan cara revaluasi.

3.9.2.3 *Jasa Sosial Kemasyarakatan Lainnya*

Kegiatan ini meliputi panti asuhan dan panti wreda, output yang dihitung diperoleh dari rata-rata output per anak yang diasuh dan rata-rata output per orang tua yang dilayani sekaligus struktur inputnya. Jumlah anak yang diasuh dan jumlah orang tua yang dilayani dikalikan dengan rata-rata outputnya akan diperoleh perkiraan output kegiatan jasa sosial dan kemasyarakatan lainnya. Data diperoleh dari Kantor Kesejahteraan Sosial dan hasil Survei Khusus Pendukung Produk Domestik Regional Bruto (SK-PDRB) . Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan cara revaluasi.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tiap tahun akan diperoleh data pengeluaran per kapita, maka dengan mengalikan jumlah penduduk pertengahan tahun dengan indikator tersebut akan diperoleh nilai output yang selanjutnya dengan rasio nilai tambah bruto dapat dihitung nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dapat dilakukan

dengan cara deflasi, sebagai deflatornya adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok aneka barang dan jasa.

Untuk menghitung jasa keagamaan/ ibadat, dari survei khusus diperoleh rata-rata input rumah ibadah, selanjutnya dengan mengalikan jumlah tempat ibadat dengan rata-rata outputnya akan diperoleh nilai tambah. Untuk perhitungan atas dasar harga konstannya dapat dilakukan dengan cara revaluasi.

3.9.3 Jasa Hiburan dan Kebudayaan

Sub sektor jasa hiburan dan kebudayaan mencakup jasa, panggung kesenian, studio radio swasta, taman hiburan, bilyard, dan sebagainya. Output dan nilai tambah bruto dapat dihitung dengan pendekatan data pajak tempat hiburan dan keramaian umum dan struktur biayanya, serta persentase pemungutan pajak terhadap tempat-tempat hiburan. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan dapat dihitung dengan cara deflasi menggunakan indeks harga konsumen (IHK) kelompok aneka barang dan jasa.

Nilai tambah untuk kegiatan radio swasta dihitung dari rata-rata output per radio swasta dengan jumlah radio swasta yang ada, dan nilai tambah atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara revaluasi.

3.9.4 Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Kegiatan dalam sub sektor jasa-jasa perorangan dan rumahtangga, meliputi jasa perbengkelan, reparasi, jasa perorangan dan pembantu rumah tangga. Data mengenai rata-rata output per tenaga kerja dapat diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendukung Produk Domestik Regional Bruto (SK-PDRB) oleh Badan Pusat Statistik.

Nilai tambah bruto dapat diperkirakan dengan cara mengalikan persentase nilai tambah bruto dari hasil survei khusus dengan rata-rata outputnya, sedangkan nilai tambah bruto atas

dasar harga konstan dapat dilakukan dengan cara ekstrapolasi menggunakan tingkat pertumbuhan tenaga kerja.

<https://situbondokab.bps.go.id>

IV. URAIAN SINGKAT ANGKA PDRB

4.1. PDRB dan PDRB Perkapita tahun 2013

Pada tahun 2013 PDRB Kabupaten Situbondo atas dasar berlaku sebesar Rp 11,7 triliun. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Situbondo atas dasar berlaku sebesar Rp 10,5 triliun meningkat sebesar 13,08 persen dari 2011. PDRB Kabupaten Situbondo pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp. 9,28 Triliun. Kenaikan tersebut sepintas memang cukup tinggi karena selain kuantum (jumlah), kenaikan tersebut masih mengandung unsur inflasi. Oleh karena itu untuk melihat kenaikan riil, maka unsur inflasi harus dikeluarkan. Dengan kata lain kita harus melihat PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 4.1 PDRB dan PDRB perkapita, 2011-2013

	2011	2012	2013
PDRB ADHB (triliun Rp)	9,28	10,50	11,75
PDRB ADHK (triliun Rp)	3,74	3,99	4,26
Penduduk Pertengahan	652.042	654.153	666.013
PDRB ADHB / perkapita (Rp)	14.236.741	16.051.291	17.642.298
PDRB ADHK / perkapita (Rp)	5.742.592	6.099.490	6.396.271

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada publikasi ini masih digunakan tahun dasar 2000. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Situbondo tahun 2013 tercatat sebesar Rp 4,26 triliun. Sedangkan tahun sebelumnya PDRB Kabupaten Situbondo tahun 2012 tercatat sebesar Rp 3,99 triliun. Dan sebesar Rp 3,74 triliun pada tahun 2011. Ini berarti ekonomi kabupaten Situbondo pada tahun 2012 tumbuh sebesar 6,54 persen dan 6,87 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan tersebut betul-

betul riil dalam arti memang hanya pertumbuhan yang disebabkan karena peningkatan produksi barang dan jasa, bukan karena kenaikan harga barang.

Selain itu kita juga dapat melihat tingkat kemakmuran suatu wilayah dengan indikator yang biasa digunakan yaitu PDRB perkapita. PDRB perkapita merupakan pembagian dari nilai PDRB dengan penduduk pertengahan tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa jika suatu daerah memiliki kemakmuran yang lebih tinggi jika memiliki PDRB yang lebih tinggi. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Situbondo pada tahun 2013 menunjukkan angka sebesar Rp. 17.642.298. Sedangkan tahun sebelumnya sebesar 16.051.291. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kemakmuran Kabupaten Situbondo meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk melihat perubahan kemakmuran dari tahun ke tahun maka digunakan PDRB perkapita Atas dasar Harga Konstan. Pada tahun 2013 PDRB perkapita ADHK sebesar Rp6.396.271. Sedangkan pada tahun 2012 PDRB perkapita ADHK sebesar Rp6.099.490. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun kemakmuran masyarakat Situbondo semakin meningkat.

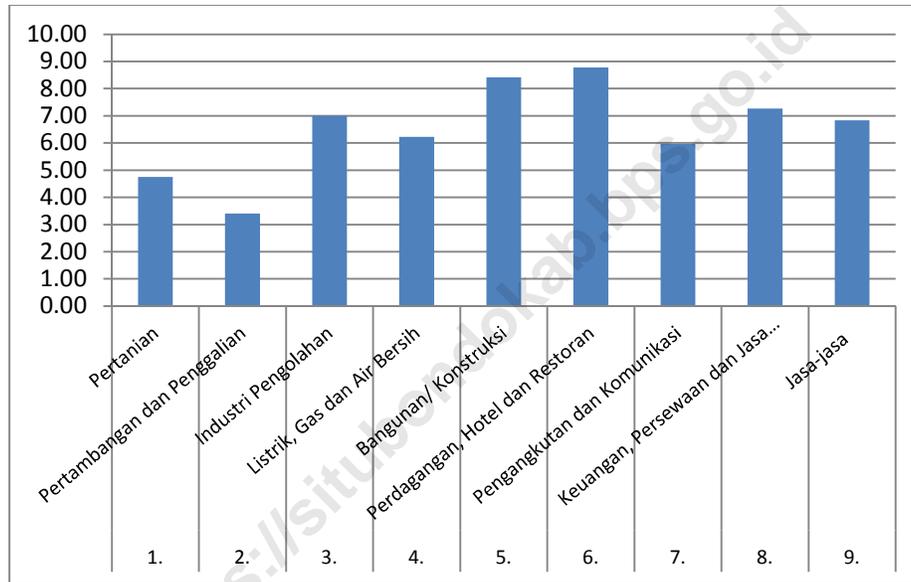
4.2. Laju Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi)

Laju pertumbuhan PDRB atau biasa disebut pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan jumlah barang dan jasa yang di produksi disuatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo tiga tahun terakhir yaitu 2011 sebesar 6,31, tahun 2012 sebesar 6,54 persen dan tahun 2013 sebesar 6,87 Persen. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keu. real estat, & jasa perusahaan merupakan dua sektor pendukung terbesar dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013. Sektor

perdagangan, hotel dan restoran memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,77 Persen. Pada sektor ini subsektor restoran sebagai penyumbang utamanya memiliki pertumbuhan sebesar 8,78 persen. Sektor konstruksi, sektor kedua yang memiliki pertumbuhan tertinggi , memiliki pertumbuhan sebesar 8,42 persen .

Gambar 4.1 Pertumbuhan ekonomi 2013 menurut sektor, Tahun 2013



Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

Sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan pada tahun ini memiliki pertumbuhan sebesar, 7,27 sedangkan sektor industri pengolahan memiliki pertumbuhan sebesar 7,00. Kemudian disusul oleh sektor jasa jasa yang memiliki pertumbuhan sebesar 6,83 persen, dan listrik, gas dan air bersih sebesar 6,22 persen.

Tiga sektor memiliki pertumbuhan paling rendah yaitu pengangkutan dan komunikasi (5,97 persen) , sektor pertanian (4,76), dan sektor pertambangan dan penggalian (3,4 persen).

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo menurut Sektor, Tahun 2013

No.	Sektor	2013 (Persen)
1.	Pertanian	4.76
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.40
3.	Industri Pengolahan	7.00
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	6.22
5.	Konstruksi	8.42
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.77
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5.97
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7.27
9.	Jasa-jasa	6.83
	Pertumbuhan Ekonomi	6,87

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

4.3. Tingkat inflasi tahun 2013

Laju indeks implisit disebut juga inflasi merupakan angka pertumbuhan dari indeks harga implisit. Indeks harga ini diperoleh dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar konstan. Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa. Sebenarnya perkembangan harga tidak selalu menunjukkan kenaikan (inflasi) tetapi terkadang juga menunjukkan penurunan (deflasi). Namun demikian karena secara umum harga selalu meningkat, masyarakat umum lebih mengenal istilah inflasi.

Pada tahun 2013 inflasi PDRB kabupaten Situbondo sebesar 4,73 persen . Sehingga apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa inflasi PDRB pada tahun 2013 lebih rendah dari inflasi tahun 2012 (6,14).

Inflasi PDRB Kabupaten Situbondo pada tahun 2013 menurut sektor dapat dilihat seperti pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Tingkat Inflasi Sektoral Kabupaten Situbondo Tahun 2012 (Persen)

No.	Sektor	2012 (Persen)
1.	Pertanian	4.84
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.18
3.	Industri Pengolahan	5.01
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.15
5.	Konstruksi	5.45
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.38
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6.82
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.04
9.	Jasa-jasa	4.68
	Indeks Implisit	4,73

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

Ada empat sektor yang memiliki inflasi diatas tingkat inflasi umum atau bisa disebut empatsektor ini yang mendorong laju inflasi. Sektor tersebut adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (6,82 persen), sektor konstruksi(5,45persen), sektor industri pengolahan (5,01persen) dan sektor pertanian (4,84 persen)

Sementara itu lima sektor lainnya memiliki inflasi dibawah inflasi umum yaitu sektor jasa jasa (4,86 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran(4,68 persen), sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan (4,04 persen), sektor pertambangan dan penggalian (3,18 persen) dan sektor listrik, gas dan air bersih (2,15 persen)

4.4 Struktur Ekonomi Tahun 2013

Secara garis besar sektor sektor ekonomi tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar yaitu sektor primer (pertanian dan penggalian), sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih dan konstruksi), sektor Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa). Komposisi PDRB menunjukkan kenaikan dan penurunan/pergeseran/struktur ekonomi masing-masing sektor dan sub sektor ekonomi. Pergeseran struktur ekonomi umumnya terjadi karena beberapa hal, antara lain : keterbatasan lahan yang dibutuhkan untuk tumbuhnya sektor primer, kecenderungan pola usaha/kegiatan ekonomi masyarakat menuju sektor sekunder dan tersier.

Dari distribusi PDRB kabupaten Situbondo pada tabel 4.4 di bawah. Sektor Primer mengalami penurunan sebesar 0,67 persen poin dari tahun sebelumnya yaitu dari 32,12 persen tahun 2012 menjadi 32,12 persen tahun 2013. Sektor sekunder juga mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin persen dari tahun sebelumnya yaitu dari 13,82 persen (tahun 2012) menjadi 13,91 persen (tahun 2013). Sektor tersier mengalami peningkatan sebesar 0,58 poin persen dari tahun sebelumnya yaitu dari 54,06 persen (tahun 2012) menjadi 54,64 persen (tahun 2013). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Situbondo pada tahun 2013 terjadi penurunan di sektor tersier dan terjadi peningkatan pada sektor primer dan sekunder

**Tabel 4.4 Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo menurut Sektor
Tahun 2012 dan 2013 (persen)**

Kelompok Sektoral		2012	2013
1.	Sektor Primer	32,12	31,45
2.	Sektor Sekunder	13,82	13,91
3.	Sektor Tersier	54,06	54,64

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

V. PERANAN SEKTORAL

5.1 Sektor Pertanian

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor pertanian perlu terus mendapat perhatian yang sangat besar karena kontribusinya terhadap perekonomian sangat menentukan, disamping sektor lainnya karena sektor ini cukup banyak menyerap tenaga kerja oleh karena itu sektor pertanian perlu terus diupayakan dalam meningkatkan nilai tambah setiap tahunnya, sebab kondisi perekonomian di Kabupaten Situbondo sangat dipengaruhi oleh struktur primer (sektor pertanian), sehingga sektor pertanian masih memberikan kontribusi besar dalam menyumbang besarnya PDRB.

Tabel 5.1

Peranan Sektor Pertanian terhadap PDRB Empat Tahun Terakhir (Persen)

Sub Sektor	Persentase Peranan Sektoral			
	2010	2011	2012	2013
1. Tanaman Bahan Makanan	17,13	16,70	15,47	15,40
2. Tanaman Perkebunan	7,81	7,82	7,97	7,63
3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,66	2,74	2,72	2,79
4. Kehutanan	0,12	0,12	0,11	0,10
5. Perikanan	3,83	3,78	3,71	3,50
Pertanian	31,56	31,15	29,99	29,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

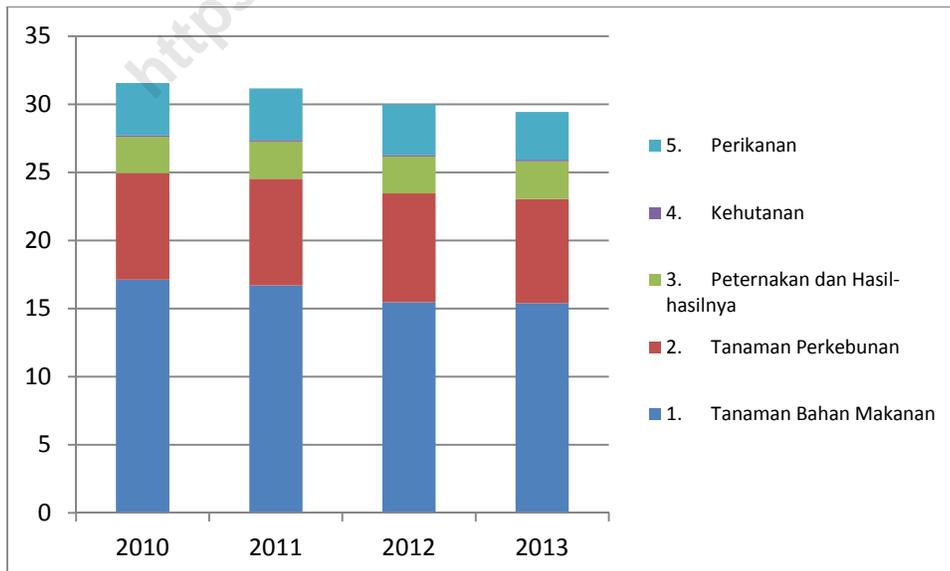
Selama empat tahun terakhir, sektor pertanian menyumbang antara 29,42 persen sampai 31,56 persen terhadap total PDRB. Peranan Sektor pertanian sedikit demi sedikit mengalami

penurunan. Pada tahun 2012 sektor pertanian turun peranannya menjadi 39,99 Persen. Dan pada tahun 2013 sektor ini turun lagi menjadi 29,42 Persen.

Dari tahun ke tahun sub sektor tanaman bahan makanan memiliki peranan terbesar pada sektor pertanian. Komoditi yang utama sub sektor ini adalah padi, jagung, kacang tanah, sayuran dan buah-buahan, utamanya sebagai penghasil mangga unggulan. Pada tahun 2013 sub sektor ini memiliki peranan sebesar 15,40 Persen .

Sub sektor perkebunan memiliki peranan kedua dalam sektor pertanian dengan peranan sebesar 7,63 Persen. Komoditi yang termasuk dalam sub sektor ini adalah kopi, tembakau, kelapa, siwalan, asam jawa dan pinang. Areal perkebunan yang ada diantaranya dikelola oleh Perusahaan Negara/ BUMN yaitu PTPN XI, Perusda Banongan, Trigatra, disamping itu juga yang diusahakan oleh perorangan dan swasta.

Gambar 5.1
Peranan Sub sektor pada sektor Pertanian tahun 2013(persen)



Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

Sub sektor perikanan menduduki peringkat ketiga dalam kontribusinya terhadap PDRB yaitu sebesar 3,50 persen. Produksi yang dihasilkan meliputi perikanan laut/ tangkap, budidaya tambak, budidaya perikanan darat/ kolam. Patut dibanggakan pula, bahwa Kabupaten Situbondo mempunyai kondisi geografis panjang pantai yang relative panjang, ini dapat menguntungkan apalagi potensi laut dan kekayaan yang terkandung didalamnya cukup berlimpah, sehingga memberikan nilai tambah yang besar bila dikelola secara profesional. Hanya saja, produksi setiap tahunnya mengalami fluktuasi pasang surut, terkadang berhasil terkadang pula gagal.

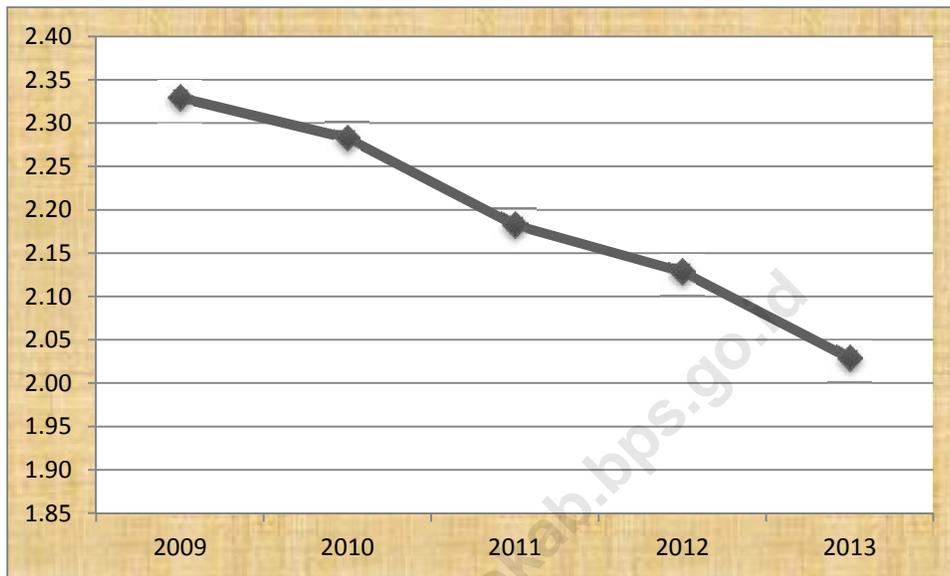
Sub sektor keempat adalah Peternakan dimana setiap tahunnya mengalami perubahan baik populasi, maupun produksi yang dihasilkan serta ternak yang keluar masuk dari dan ke Situbondo. Dari peranan sub sektor peternakan mampu memberikan kontribusi sebesar 2,79 persen.

Sub sektor kelima adalah Kehutanan dimana setiap tahunnya mengalami perubahan baik populasi, maupun produksi yang dihasilkan. Pada tahun 2013 peranan sub sektor kehutanan mengalami penurunan, yaitu menjadi 0,10 persen.

5.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Pada Sektor pertambangan dan penggalian, Kabupaten Situbondo sampai saat hanya terdapat satu subsektor yaitu subsektor penggalian. Subsektor penggalian mencakup produksi bahan tambang galian C, diantaranya komoditi tanah liat, tanah urug, batu kali, batu padas, batu kapur, pasir dan sirtu.

**Gambar 5.2 Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB
Tahun 2009 - 2013 (Persen)**



Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

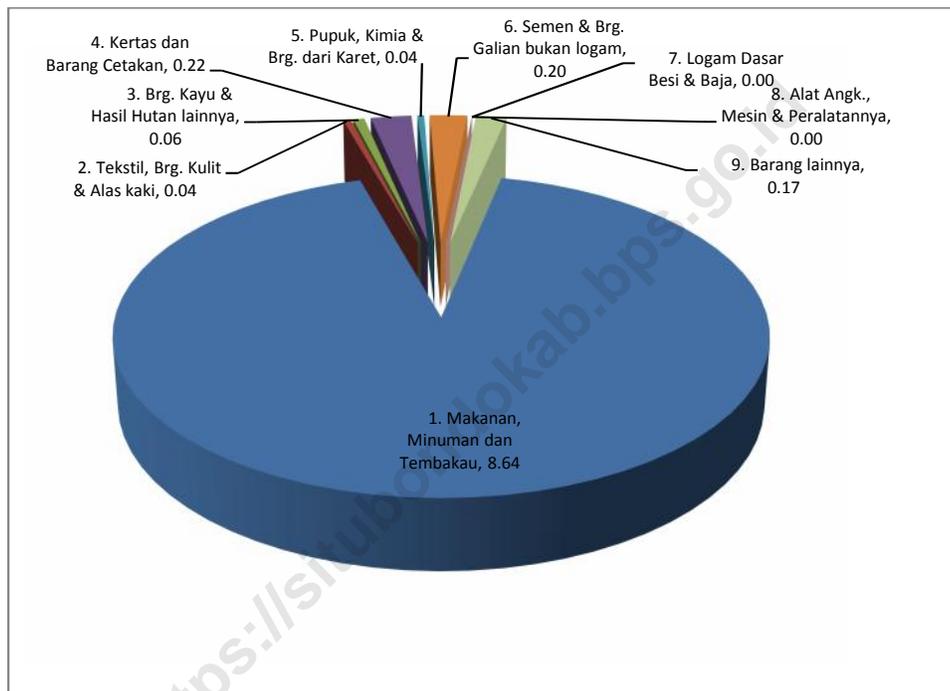
Dari Gambar 5.2 di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2009-2013 sektor ini mengalami penurunan. Pada tahun 2013 peranan sektor ini sebesar 2,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor penggalian menunjukkan perkembangan yang terus menurun dari tahun ke tahun, yang disebabkan oleh kondisi SDA yang terbatas dan diusahakan secara konvensional oleh masyarakat. Peranan dari sektor ini terhadap PDRB masih kecil dibandingkan dengan sektor yang lain, sebab belum disertai oleh peranan pertambangan dan belum disertai pula oleh investasi yang besar yang ada di Situbondo.

5.3 Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini mencakup industri kecil dan kerajinan rumah tangga, serta industri besar dan sedang, yaitu kegiatan usaha dengan jumlah tenaga kerja 20 atau lebih. Pada tahun 2013 peranan

sektor industri pengolahan sebesar 9,37 persen, meningkat sebesar 0,04 persen poin dari tahun sebelumnya.

Gambar 5.3 Peranan Sub Sektor Dalam Sektor Industri , Tahun 2012



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Pada sektor industri pengolahan terdapat dua sub sektor yaitu sub sektor industri migas dan industri bukan migas. Namun sampai saat ini Kabupaten Situbondo hanya memiliki industri bukan migas. Dari sembilan sub sektor yang ada pada sub sektor industri bukan migas, ada dua sub sub sektor yang belum ada di Kabupaten Situbondo yaitu sub sub sektor logam dasar besi dan baja dan sub sub sektor alat angkutan, mesin dan peralatannya.

Sumbangan sektor industri pengolahan secara berturut-turut ditentukan oleh sumbangan dari sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,64 persen, industri kertas dan barang cetakan 0,22 persen, industri semen dan barang galian bukan logam 0,20 persen, industri barang lainnya 0,17 persen, industri barang. kayu & hasil hutan lainnya 0,06 Persen,

industri tekstil, barang kulit & alas kaki 0,04 persen dan industri pupuk kimia dan barang dari karet sebesar 0,04 Persen.

Bila dibandingkan antara industri besar/ sedang dengan industri kecil dan kerajinan rumah tangga (IKKR) dalam menghasilkan nilai output dan nilai tambah, nilai Industri Besar dan Sedang jauh lebih besar dibandingkan dengan sub sektor industri kecil dan kerajinan rumahtangga, karena perusahaan industri dengan skala besar, pada umumnya mempunyai investasi, yang besar teknologi yang canggih, dan pekerja yang terampil, sehingga memungkinkan untuk memproduksi barang dalam skala besar serta dapat memasarkan barang yang dihasilkan sehingga dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Namun demikian dalam hal penyerapan tenaga kerja, sub sektor industri kecil dan kerajinan rumahtangga juga mempunyai andil yang cukup besar karena industri kecil dan kerajinan rumah tangga tersebar di beberapa tempat utamanya mampu menyerap tenaga kerja bagi kalangan bawah.

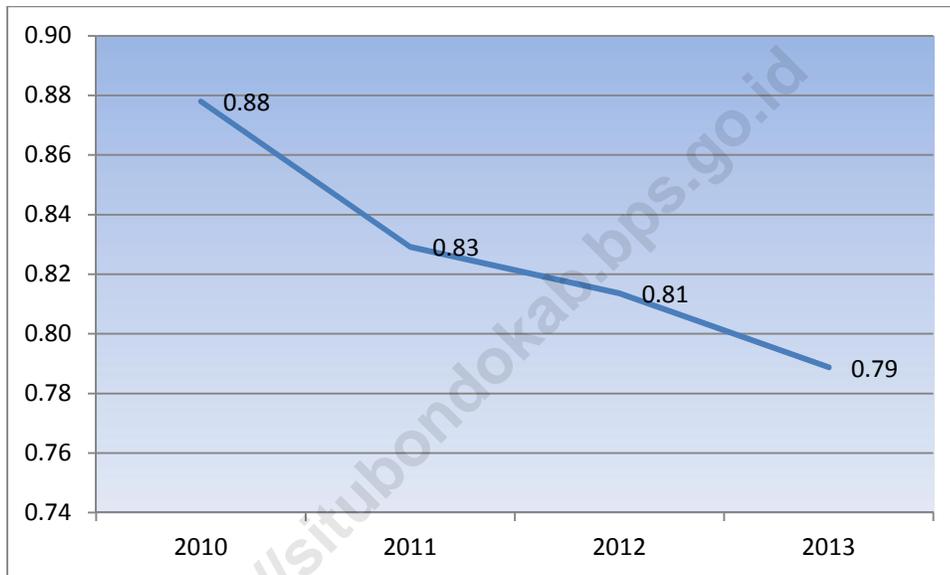
Beberapa jenis industri yang dihasilkan diantaranya Industri makanan seperti gula, ikan olahan/ pindang, sleg, kerupuk, mie/sohun, kecap, tahu, tempe, tepung dll. Industri mebel kerajinan kerang, surving dan kerajinan lainnya.

5.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Sumbangan sektor listrik, gas dan air bersih terhadap besarnya PDRB selama empat tahun terakhir mengalami naik turun dalam rentang 0,79 persen sampai 0,88Persen. Pada tahun 2010 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 0,88 Persen, sedangkan tahun 2011 kontribusinya turun menjadi sebesar 0,83 Persen atau lebih rendah 0,05 Persen. Pada tahun 2012 kontribusi sektor ini turun menjadi 0,81 Persen atau turun sebesar 0,02 Persen. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini turun menjadi 0,79 Persen atau turun sebesar 0,02 Persen .Penurunan pada

sektor ini sangat wajar karena sektor ini merupakan sektor padat modal sehingga membutuhkan modal yang besar untuk meningkatkan nilai tambahnya.

Grafik : 5.4 Peranan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Terhadap PDRB, Tahun 2010-2013

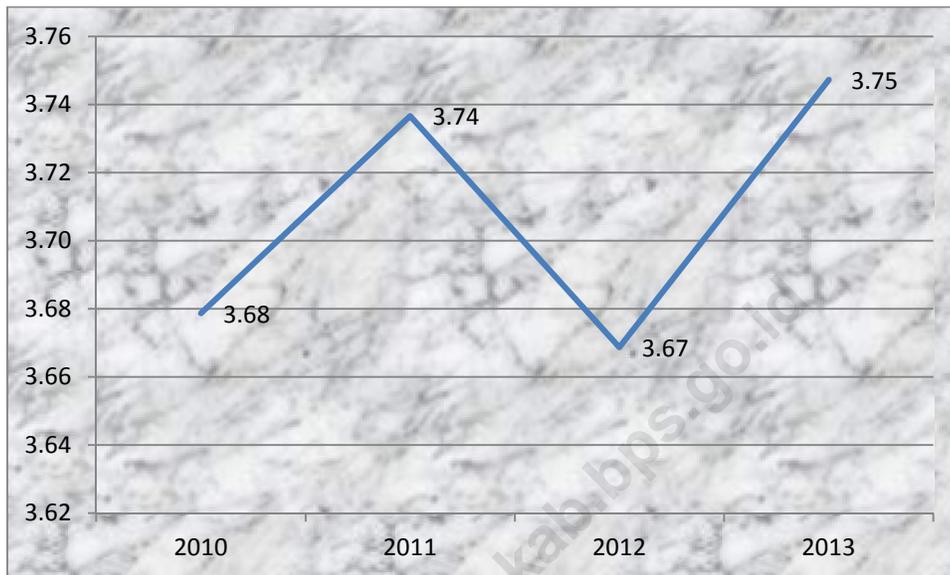


Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Situbondo

5.5 Sektor Konstruksi/Bangunan

Jika dilihat dari empat tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai tahun 2013 peranan sektor konstruksi peranan sektor konstruksi mengalami naik turun.. Pada tahun 2009 sektor konstruksi memiliki peranan sebesar 3,81 Persen, pada tahun 2010 turun menjadi 3,68 persen. Tahun 2011 naik menjadi 3,74 persen dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 3,67 persen. Pembangunan di sektor konstruksi, dari tahun ke tahun ditandai oleh meningkatnya jumlah fisik bangunan, baik yang dibangun oleh masyarakat sendiri, pemerintah maupun swasta. Kegiatan pembangunan fisik konstruksi diantaranya adalah berupa gedung, jalan, jembatan, dam, irigasi, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum dan konstruksi lainnya.

Gambar 5.5
Peranan Sektor Konstruksi tahun 2010 - 2013



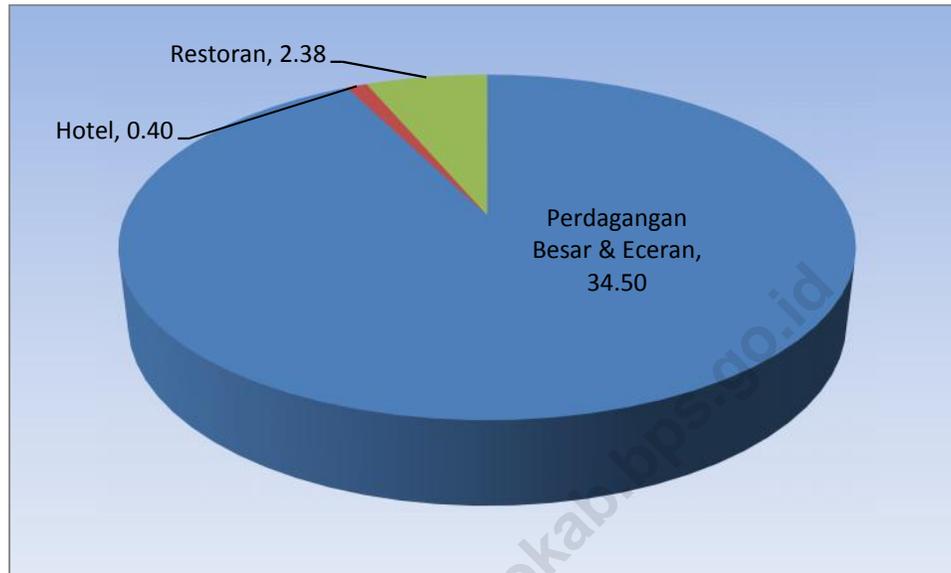
Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Situbondo

5.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang memiliki peranan paling besar pada PDRB Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2010 mampu menyumbang sebesar 35,55 persen, tahun 2011 mampu menyumbang 36,75 persen sedangkan pada tahun 2013 sumbangan sektor ini sebesar 37,28 persen. Hal ini berarti sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang paling dominan sumbangannya dalam perekonomian Kabupaten Situbondo.

Subsektor yang utama dalam sektor ini adalah sub sektor perdagangan. Pada tahun 2013 sub sektor perdagangan memiliki peranan terhadap PDRB Kabupaten Situbondo sebesar 34,50 persen, sedangkan untuk sub sektor Hotel hanya sebesar 0,40 persen dan sub sektor restoran sebesar 2,38 persen.

**Gambar 5.6 Kontribusi Sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran Tahun 2013**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Walaupun sumbangan sub sektor hotel dan restoran peranannya kecil, yaitu kurang dari 5 persen, akan tetapi perkembangannya di Kabupaten Situbondo perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius karena merupakan potensi daerah wisata yang perlu dikembangkan. Hal tersebut cukup berperan terhadap sektor-sektor lainnya dalam menunjang sektor-sektor lain yang berkaitan, seperti berkembangnya industri kerajinan, jasa-jasa dan sektor lainnya.

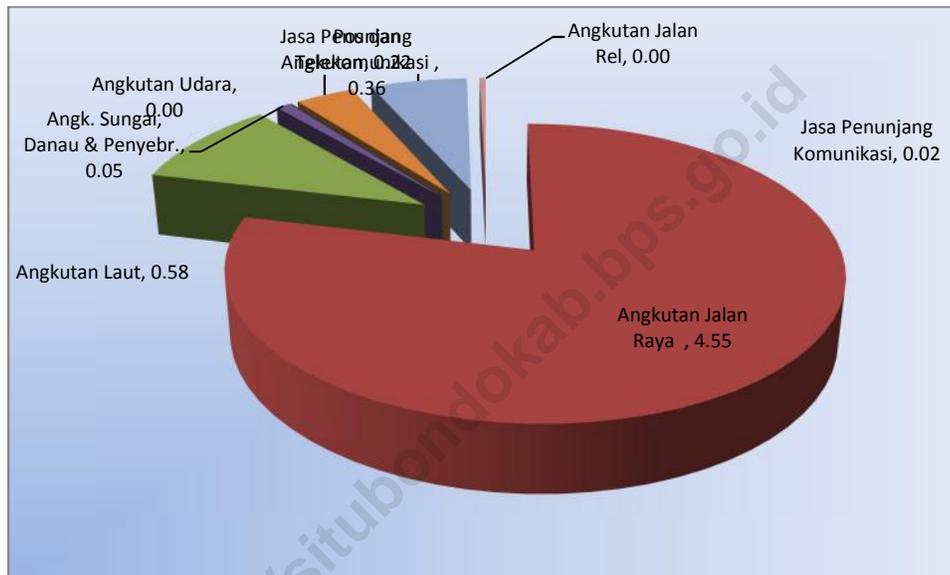
Dalam konsep statistik, yang dimaksud sub sektor restoran termasuk juga usaha kecil seperti warung makan, depot, kedai, dan rumah makan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah sampai pelosok desa.

5.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor ini terbagi atas sub sektor pengangkutan dan komunikasi. Peranan dari sektor ini dalam menyumbang besarnya PDRB terbesar ditentukan oleh peranan dari sub sektor angkutan jalan

raya dan angkutan laut, dimana terdapat dua kantor pelabuhan yaitu pelabuhan Kalbut dan Panarukan. Pelabuhan Kalbut meliputi satker besuki, kalbut, jangkar, pasir putih dan mimbo.

Gambar 5.7 Kontribusi Sektor Pengangkutan, dan Komunikasi, 2013



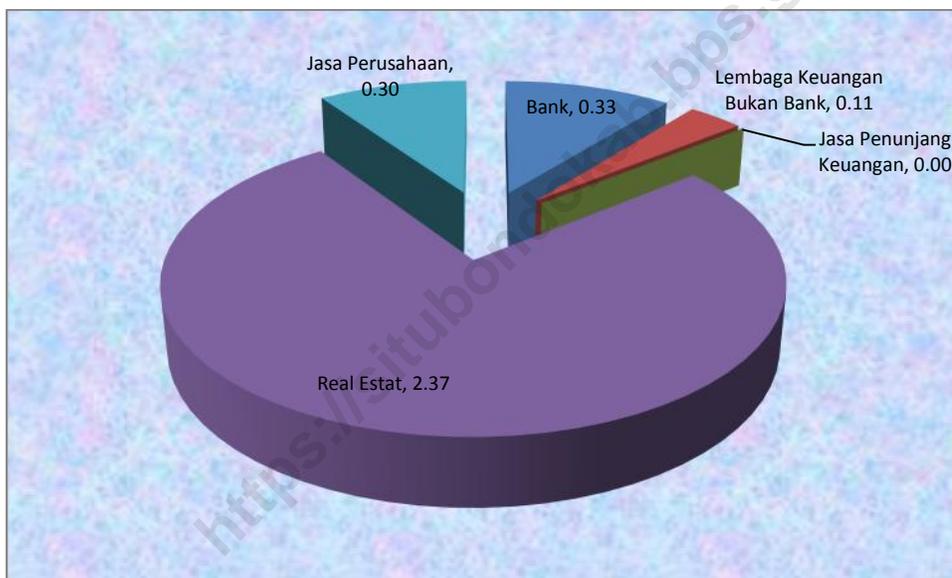
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Pada tahun 2013 peranan dari sektor ini disumbang oleh sub sektor pengangkutan sebesar 5,40 persen dan sub sektor komunikasi sebesar 0,38 persen. Sumbangan dari sub sektor pengangkutan meliputi, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan penyeberangan dan jasa penunjang angkutan, sedangkan sub sektor komunikasi meliputi kegiatan pos, telekomunikasi, dan jasa penunjang komunikasi. Sub sub sektor angkutan jalan raya memiliki peranan terhadap PDRB kabupaten terbesar pada sub sektor pengangkutan yaitu sebesar 4,55 persen.

5.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dari tahun ke tahun terus menunjukkan angka yang meningkat, persentase kontribusi terhadap PDRB untuk tahun 2013 sebesar 3,11 persen atau turun 0,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 5.8 Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Seiring dengan laju sektor keuangan yang mengalami peningkatan, peranan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) juga meningkat seiring dibutuhkannya keuangan oleh masyarakat, khususnya dalam menunjang perekonomian di daerah. Hal ini dapat ditunjukkan oleh semakin pentingnya peranan perbankan sampai level mikro/ desa untuk menggerakkan perekonomian daerah. Peranan dari perbankan dan lembaga keuangan non bank ini memberikan kontribusi sebesar 0,44 Persen akan tetapi sangat menopang sektor yang lain seperti perdagangan, pertanian, industri dan jasa-jasa. Pertumbuhan sektor ini juga tidak lepas dari perhatian pemerintah terutama kemudahan dalam berbagai macam fasilitas pada koperasi.

Dari kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ini berturut-turut disumbang oleh sub sektor bank 0,33 Persen, sub sektor lembaga keuangan bukan bank (LKBB) 0,11 persen, sub sektor sewa bangunan 2,37 persen dan jasa perusahaan 0,30 persen.

5.9 Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa meliputi dua sub sektor, yaitu sub sektor pemerintahan umum dan swasta, sedangkan sub sektor swasta itu sendiri meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan serta jasa perorangan dan rumah tangga.

Kontribusi dari sektor jasa-jasa ada tahun 2013 sebesar 8,47 persen, yakni dari sub sektor pemerintahan umum 4,74 persen dan sub sektor swasta sebesar 3,74 persen, sedangkan untuk sub sektor swasta masing masing disumbang oleh sub sektor jasa sosial kemasyarakatan 0,91 persen, sub sektor jasa hiburan dan rekreasi 0,33 persen dan sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga 2,50 persen.

VI. TINJAUAN EKONOMI WILAYAH

6.1. TINJAUAN EKONOMI WILAYAH DI SEKITAR KABUPATEN SITUBONDO.

Posisi Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan beberapa Kabupaten di sekitar memberikan kita gambaran mengenai capaian usaha perekonomian dan karakteristiknya. Mayoritas Kabupaten di sekitar Situbondo struktur ekonominya didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian di kabupaten Banyuwangi mencapai 43,46 persen, Kabupaten Jember sebesar 34,24 persen, Kabupaten Bondowoso pada kisaran 42,01 persen, Kabupaten Probolinggo sekitar 28,53 persen, Kabupaten Lumajang 32,43 persen dan Kabupaten Situbondo sendiri sebesar 29,42 persen, sedangkan Kota Probolinggo hanya 5,89 persen.

Tabel 6.1
PDRB adhb per Kabupaten Tahun 2013

No	Kabupaten/ Kota	PDRB adhb (Rp)
-1	-2	-3
1	Banyuwangi	35,468,869.23
2	Jember	36,875,274.82
3	Situbondo	11,749,384.83
4	Bondowoso	9,990,799.34
5	Probolinggo	21,368,677.96
6	Kot Probolinggo	6,674,888.64
7	Lumajang	19,727,724.26

Sumber : BPS Situbondo

Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing wilayah sangat tergantung oleh luas wilayah dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Potensi

tersebut dapat berupa sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Kemampuan sumberdaya manusia diharapkan akan menciptakan upaya lebih dalam menginovasi pembangunan sehingga dapat menggeser struktur ekonomi dari struktur ekonomi primer kearah sektor ekonomi sekunder dan tersier yang menuntut adanya teknologi dalam pengembangannya. PDRB Situbondo masih jauh dibawah beberapa kabupaten semisal Banyuwangi, Jember dan bahkan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang sekalipun. Namun masih lebih besar daripada Kabupaten Bondowoso karena selain Situbondo memiliki potensi Pantai yang tidak dimiliki Bondowoso juga eskalasi Industri yang lebih intensif dengan beberapa perusahaan penghasil gula dan perusahaan yang bergerak dalam industry hasil perikanan.

TABEL POKOK PDRB KABUPATEN SITUBONDO 2013

<https://situbondokab.go.id/bps.go.id>

**Tabel 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SITUBUNDO
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2010 - 2013 (JUTA RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013
1. PERTANIAN	2,610,923.02	2,891,912.57	3,147,874.36	3,457,198.13
a. Tanaman Bahan Makanan	1,417,505.77	1,550,498.72	1,624,264.75	1,809,093.93
b. Tanaman Perkebunan	646,320.44	725,632.10	836,648.02	896,722.55
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	219,822.35	254,200.45	285,797.98	328,053.35
d. Kehutanan	10,069.27	10,853.42	11,314.07	12,038.15
e. Perikanan	317,205.18	350,727.88	389,849.54	411,290.15
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	188,848.25	202,583.92	223,434.11	238,370.50
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan Bukan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Penggalian	188,848.25	202,583.92	223,434.11	238,370.50
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	767,665.40	875,146.17	979,802.78	1,100,975.66
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Bukan Migas	767,665.40	875,146.17	979,802.78	1,100,975.66
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	697,857.58	802,780.41	900,283.73	1,015,195.63
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	4,037.19	4,256.03	4,675.22	4,933.75
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	5,030.05	5,885.29	6,556.42	7,152.92
4. Kertas dan Barang Cetakan	19,382.73	21,194.96	24,010.11	25,958.19
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	3,566.03	3,600.62	4,041.78	4,316.92
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	18,704.73	19,449.72	21,585.10	23,858.40
7. Logam Dasar Besi & Baja	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Barang lainnya	19,087.09	17,979.14	18,650.42	19,559.85
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	72,642.32	76,972.00	85,404.37	92,664.63
a. Listrik	67,550.23	71,680.18	79,636.87	86,436.86
b. Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	5,092.09	5,291.83	5,767.50	6,227.77
5. KONSTRUKSI	304,375.11	346,869.58	385,095.16	440,280.84

Lanjutan Tabel 1

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	2,906,698.92	3,299,976.10	3,857,862.72	4,380,142.90
a. Perdagangan Besar & Eceran	2,687,674.28	3,053,926.34	3,568,243.31	4,053,506.48
b. Hotel	35,513.89	38,329.59	43,333.45	47,416.09
c. Restoran	183,510.75	207,720.17	246,285.96	279,220.33
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	471,863.84	518,557.67	599,971.66	679,106.46
a. Pengangkutan	442,862.72	486,356.71	561,209.48	634,391.76
1. Angkutan Jalan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Angkutan Jalan Raya	374,290.02	409,342.97	475,052.84	534,818.11
3. Angkutan Laut	47,194.05	52,395.97	59,235.41	67,786.43
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	4,459.86	4,957.35	5,470.19	6,225.47
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Jasa Penunjang Angkutan	16,918.79	19,660.42	21,451.04	25,561.75
b. Komunikasi	29,001.11	32,200.96	38,762.18	44,714.70
1. Pos dan Telekomunikasi	27,039.06	30,081.95	36,410.30	42,068.07
2. Jasa Penunjang Komunikasi	1,962.06	2,119.01	2,351.88	2,645.86
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	253,565.33	290,733.89	327,217.02	365,177.53
a. Bank	25,101.11	30,576.22	34,157.33	39,078.82
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	8,225.07	10,283.23	11,371.61	12,828.02
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Real Estat	191,352.34	221,350.32	250,110.00	278,464.12
e. Jasa Perusahaan	28,886.81	28,524.13	31,578.08	34,806.57
9. JASA-JASA	697,369.57	780,200.98	890,164.49	995,468.18
a. Pemerintahan Umum	376,800.53	427,778.04	491,137.96	556,477.04
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	376,800.53	427,778.04	491,137.96	556,477.04
2. Jasa Pemerintah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Swasta	320,569.04	352,422.94	399,026.53	438,991.14
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	73,315.32	85,422.08	97,756.69	107,472.08
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	30,570.47	29,954.49	34,248.86	38,205.33
3. Jasa Perorangan & Rumahtangga	216,683.25	237,046.36	267,020.98	293,313.73
PDRB	8,273,951.76	9,282,952.88	10,496,826.67	11,749,384.83
PDRB TANPA MIGAS	8,273,951.76	9,282,952.88	10,496,826.67	11,749,384.83

**Tabel 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SITUBUNDO
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2010 - 2013 (JUTA RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013
1. PERTANIAN	1,151,164.26	1,176,563.14	1,206,698.20	1,264,086.89
a. Tanaman Bahan Makanan	619,112.14	626,687.36	636,405.96	665,491.50
b. Tanaman Perkebunan	303,309.39	312,498.18	323,921.03	338,916.71
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	86,617.79	92,223.53	98,483.23	105,332.86
d. Kehutanan	3,433.31	3,400.74	3,465.96	3,569.23
e. Perikanan	138,691.62	141,753.33	144,422.02	150,776.59
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	72,055.01	73,496.11	76,048.68	78,634.34
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan Bukan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Penggalian	72,055.01	73,496.11	76,048.68	78,634.34
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	355,431.80	380,342.05	402,676.27	430,875.18
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Bukan Migas	355,431.80	380,342.05	402,676.27	430,875.18
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	322,466.87	348,178.84	369,206.07	395,105.92
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	1,732.09	1,718.89	1,741.01	1,852.43
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	2,276.17	2,467.28	2,593.43	2,780.16
4. Kertas dan Barang Cetakan	10,517.78	10,806.32	11,437.01	12,042.75
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	1,753.17	1,683.80	1,788.34	1,933.20
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	7,988.90	7,791.30	8,113.98	8,884.81
7. Logam Dasar Besi & Baja	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Barang lainnya	8,696.81	7,695.62	7,796.43	8,275.91
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	31,558.83	33,076.81	34,980.93	37,157.12
a. Listrik	29,581.73	31,045.72	32,892.81	34,931.18
b. Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	1,977.10	2,031.09	2,088.12	2,225.94
5. KONSTRUKSI	102,085.67	108,221.46	115,163.07	124,859.80

Lanjutan Tabel 2

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	1,208,399.61	1,325,976.89	1,454,321.54	1,581,902.45
a. Perdagangan Besar & Eceran	1,102,353.68	1,211,268.27	1,329,201.82	1,446,112.01
b. Hotel	17,998.60	18,795.94	19,748.46	21,170.35
c. Restoran	88,047.33	95,912.68	105,371.26	114,620.09
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	177,655.20	192,895.83	208,463.87	220,901.91
a. Pengangkutan	163,834.46	177,720.67	191,466.59	202,329.16
1. Angkutan Jalan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Angkutan Jalan Raya	138,168.88	149,272.60	160,456.25	168,973.09
3. Angkutan Laut	17,079.48	18,724.25	20,190.22	21,475.63
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	1,966.91	2,143.45	2,322.35	2,456.05
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Jasa Penunjang Angkutan	6,619.19	7,580.37	8,497.77	9,424.39
b. Komunikasi	13,820.73	15,175.16	16,997.28	18,572.75
1. Pos dan Telekomunikasi	12,859.92	14,137.49	15,898.96	17,431.34
2. Jasa Penunjang Komunikasi	960.81	1,037.67	1,098.32	1,141.41
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	122,354.27	133,618.81	144,903.81	155,433.95
a. Bank	11,663.01	13,642.19	14,675.00	15,775.13
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	4,622.42	5,539.24	5,942.59	6,393.90
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Real Estat	89,641.11	98,935.21	107,909.01	116,013.99
e. Jasa Perusahaan	16,427.72	15,502.17	16,377.21	17,250.93
9. JASA-JASA	301,350.69	320,220.50	346,036.59	369,676.73
a. Pemerintahan Umum	163,199.43	177,555.11	193,919.37	207,881.56
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	163,199.43	177,555.11	193,919.37	207,881.56
2. Jasa Pemerintah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Swasta	138,151.25	142,665.39	152,117.22	161,795.17
1. Jasa Sosial Masyarakat	29,536.76	32,016.23	34,519.13	36,784.72
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	15,515.81	14,321.00	15,357.22	16,378.78
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	93,098.68	96,328.16	102,240.87	108,631.67
PDRB	3,522,055.33	3,744,411.60	3,989,292.96	4,263,528.37
PDRB TANPA MIGAS	3,522,055.33	3,744,411.60	3,989,292.96	4,263,528.37

**Tabel 3. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SITUBUNDO
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2010 - 2013 (JUTA RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013
1. PERTANIAN	31.56	31.15	29.99	29.42
a. Tanaman Bahan Makanan	17.13	16.70	15.47	15.40
b. Tanaman Perkebunan	7.81	7.82	7.97	7.63
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2.66	2.74	2.72	2.79
d. Kehutanan	0.12	0.12	0.11	0.10
e. Perikanan	3.83	3.78	3.71	3.50
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	2.28	2.18	2.13	2.03
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan Bukan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Penggalian	2.28	2.18	2.13	2.03
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	9.28	9.43	9.33	9.37
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Bukan Migas	9.28	9.43	9.33	9.37
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	8.43	8.65	8.58	8.64
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	0.05	0.05	0.04	0.04
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	0.06	0.06	0.06	0.06
4. Kertas dan Barang Cetak	0.23	0.23	0.23	0.22
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	0.04	0.04	0.04	0.04
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	0.23	0.21	0.21	0.20
7. Logam Dasar Besi & Baja	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Barang lainnya	0.23	0.19	0.18	0.17
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0.88	0.83	0.81	0.79
a. Listrik	0.82	0.77	0.76	0.74
b. Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	0.06	0.06	0.05	0.05
5. KONSTRUKSI	3.68	3.74	3.67	3.75

Lanjutan Tabel 3

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	35.13	35.55	36.75	37.28
a. Perdagangan Besar & Eceran	32.48	32.90	33.99	34.50
b. Hotel	0.43	0.41	0.41	0.40
c. Restoran	2.22	2.24	2.35	2.38
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5.70	5.59	5.72	5.78
a. Pengangkutan	5.35	5.24	5.35	5.40
1. Angkutan Jalan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Angkutan Jalan Raya	4.52	4.41	4.53	4.55
3. Angkutan Laut	0.57	0.56	0.56	0.58
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.05	0.05	0.05	0.05
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Jasa Penunjang Angkutan	0.20	0.21	0.20	0.22
b. Komunikasi	0.35	0.35	0.37	0.38
1. Pos dan Telekomunikasi	0.33	0.32	0.35	0.36
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0.02	0.02	0.02	0.02
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	3.06	3.13	3.12	3.11
a. Bank	0.30	0.33	0.33	0.33
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.10	0.11	0.11	0.11
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Real Estat	2.31	2.38	2.38	2.37
e. Jasa Perusahaan	0.35	0.31	0.30	0.30
9. JASA-JASA	8.43	8.40	8.48	8.47
a. Pemerintahan Umum	4.55	4.61	4.68	4.74
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	4.55	4.61	4.68	4.74
2. Jasa Pemerintah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Swasta	3.87	3.80	3.80	3.74
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	0.89	0.92	0.93	0.91
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	0.37	0.32	0.33	0.33
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	2.62	2.55	2.54	2.50
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00
PDRB TANPA MIGAS	100.00	100.00	100.00	100.00

**Tabel 4. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SITUBUNDO
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2010 - 2013 (JUTA RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013
1. PERTANIAN	4.89	2.21	2.56	4.76
a. Tanaman Bahan Makanan	4.74	1.22	1.55	4.57
b. Tanaman Perkebunan	3.13	3.03	3.66	4.63
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	5.16	6.47	6.79	6.96
d. Kehutanan	3.21	-0.95	1.92	2.98
e. Perikanan	9.50	2.21	1.88	4.40
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	3.21	2.00	3.47	3.40
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan Bukan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Penggalian	3.21	2.00	3.47	3.40
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	6.23	7.01	5.87	7.00
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Bukan Migas	6.23	7.01	5.87	7.00
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	6.42	7.97	6.04	7.02
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	2.38	-0.76	1.29	6.40
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	2.09	8.40	5.11	7.20
4. Kertas dan Barang Cetak	7.77	2.74	5.84	5.30
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	2.04	-3.96	6.21	8.10
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	3.16	-2.47	4.14	9.50
7. Logam Dasar Besi & Baja	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Barang lainnya	3.21	-11.51	1.31	6.15
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	4.92	4.81	5.76	6.22
a. Listrik	4.90	4.95	5.95	6.20
b. Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	5.13	2.73	2.81	6.60
5. KONSTRUKSI	3.47	6.01	6.41	8.42

Lanjutan tabel 4

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	7.73	9.73	9.68	8.77
a. Perdagangan Besar & Eceran	7.83	9.88	9.74	8.80
b. Hotel	4.93	4.43	5.07	7.20
c. Restoran	7.06	8.93	9.86	8.78
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4.21	8.58	8.07	5.97
a. Pengangkutan	4.18	8.48	7.73	5.67
1. Angkutan Jalan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Angkutan Jalan Raya	4.10	8.04	7.49	5.31
3. Angkutan Laut	4.61	9.63	7.83	6.37
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	5.16	8.98	8.35	5.76
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Jasa Penunjang Angkutan	4.28	14.52	12.10	10.90
b. Komunikasi	4.67	9.80	12.01	9.27
1. Pos dan Telekomunikasi	4.85	9.93	12.46	9.64
2. Jasa Penunjang Komunikasi	2.41	8.00	5.84	3.92
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	3.49	9.21	8.45	7.27
a. Bank	3.30	16.97	7.57	7.50
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	3.19	19.83	7.28	7.59
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Real Estat	3.47	10.37	9.07	7.51
e. Jasa Perusahaan	3.82	-5.63	5.64	5.33
9. JASA-JASA	4.14	6.26	8.06	6.83
a. Pemerintahan Umum	4.76	8.80	9.22	7.20
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	4.76	8.80	9.22	7.20
2. Jasa Pemerintah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Swasta	3.43	3.27	6.63	6.36
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	2.35	8.39	7.82	6.56
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	4.12	-7.70	7.24	6.65
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	3.66	3.47	6.14	6.25
PDRB	5.75	6.31	6.54	6.87
PDRB TANPA MIGAS	5.75	6.31	6.54	6.87

**Tabel 5. LAJU INDEKS IMPLISIT KABUPATEN SITUBUNDO
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2010 - 2013 (JUTA JUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013
1. PERTANIAN	5.65	8.37	6.13	4.84
a. Tanaman Bahan Makanan	5.53	8.06	3.16	6.51
b. Tanaman Perkebunan	4.94	8.97	11.23	2.44
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	5.28	8.61	5.28	7.32
d. Kehutanan	9.82	8.82	2.28	3.32
e. Perikanan	7.61	8.18	9.10	1.05
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	6.59	5.17	6.59	3.18
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan Bukan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Penggalian	6.59	5.17	6.59	3.18
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5.85	6.53	5.75	5.01
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Bukan Migas	5.85	6.53	5.75	5.01
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	5.76	6.54	5.76	5.37
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	8.47	6.23	8.45	-0.82
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	6.01	7.94	5.98	1.77
4. Kertas dan Barang Cetak	7.08	6.43	7.04	2.68
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	5.74	5.13	5.69	-1.20
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	6.58	6.62	6.57	0.94
7. Logam Dasar Besi & Baja	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Barang lainnya	7.12	6.45	2.39	-1.20
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	7.51	1.10	4.92	2.15
a. Listrik	7.23	1.11	4.86	2.21
b. Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	11.25	1.16	6.01	1.29
5. KONSTRUKSI	4.78	7.50	4.33	5.45

Lanjutan Tabel 5

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	6.97	3.46	6.59	4.38
a. Perdagangan Besar & Eceran	6.88	3.41	6.47	4.42
b. Hotel	7.61	3.35	7.60	2.07
c. Restoran	7.98	3.91	7.92	4.22
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	7.52	1.21	7.06	6.82
a. Pengangkutan	7.53	1.24	7.11	6.97
1. Angkutan Jalan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Angkutan Jalan Raya	7.97	1.23	7.96	6.91
3. Angkutan Laut	5.37	1.27	4.84	7.59
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	2.73	2.00	1.84	7.61
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Jasa Penunjang Angkutan	5.36	1.47	-2.67	7.45
b. Komunikasi	7.44	1.12	7.47	5.57
1. Pos dan Telekomunikasi	7.63	1.20	7.63	5.38
2. Jasa Penunjang Komunikasi	4.87	0.00	4.86	8.25
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	3.73	4.99	3.78	4.04
a. Bank	3.85	4.14	3.85	6.43
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	3.08	4.33	3.08	4.84
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Real Estat	3.60	4.81	3.60	3.56
e. Jasa Perusahaan	4.79	4.64	4.79	4.64
9. JASA-JASA	5.60	5.29	5.58	4.68
a. Pemerintahan Umum	5.12	4.35	5.12	5.69
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	5.12	4.35	5.12	5.69
2. Jasa Pemerintah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Swasta	6.15	6.46	6.19	3.43
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	6.14	7.49	6.14	3.17
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	6.62	6.16	6.62	4.59
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	6.13	5.73	6.13	3.38
PDRB	6.16	5.53	6.14	4.73
PDRB TANPA MIGAS	6.16	5.53	6.14	4.73

<https://situbondo.kab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Jalan Raya Wringin Anom Panarukan

Telp/Fax : 0338 671996, 0338 670269

Email : bps3512@bps.go.id